

ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ICMI



SKRIPSI

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

OLEH:

FARIDA

E III 02 039

PERFUSORAN	
Tgl. Terima	02-06-08
Asal Dasi	Fak. Suspol
Bagian	1 temp
Marga	Haridaf
No. Inventaris	147
No. Klas	

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI**
Nama : **F A R I D A**
Nim : **E111 02 039**
Program Studi : **Ilmu Politik**
Jurusan : **Ilmu Politik Pemerintahan**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Telah diterima dan disetujui oleh Dosen pembimbing dan ketua Jurusan Politik Pemerintahan untuk diajukan kepada panitia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 26 Mei 2008

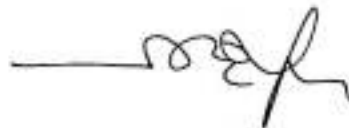
Menyetujui,

Konsultan I



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 130 786 086

Konsultan II



A. Naharuddin, Sip, M.Si
NIP. 132 300 778

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 130 786 086

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ICMI
NAMA : F A R I D A
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK
JURUSAN : ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Telah diterima oleh Tim Evaluasi sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik. Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2008.

TIM EVALUASI

KETUA : Dr. M. Kausar Bailusy, MA
SEKRETARIS : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
ANGGOTA : Dr. Armin Arsyad, M.Si
: Dr. Muhammad Al-Hamid, M.Si
: Drs. Muhammad Saad, MA

The image shows four handwritten signatures, each with a dotted line underneath it. The signatures are written in black ink. The first signature is the most legible, appearing to be 'M. Kausar'. The second signature is more stylized and less legible. The third signature is also stylized. The fourth signature is the simplest, appearing to be 'M. Saad'.

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, serta tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan salawat kepada Junjungan umat manusia Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa pelita ilmu kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kerendahan hati dan diri dalam menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran secara sistematis dan bahasa ilmiah yang dimiliki penulis, dirasakan masih sangat terbatas sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis berharap dari pembaca yang budiman memohon saran dan kritikan yang sifatnya yang sifatnya konstruktif dan membangun demi kesempurnaan isi dan lebih berbobot dari skripsi ini,

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi namun berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan bimbingan dari-Nya, sumbangsih moril dan materiil dari berbagai pihak sehingga dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Dr. Deddy Tixsanawadi Tikson, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP-UH, dan sebagai Pembimbing pertama.
- Bapak A. Naharuddin, S.IP.M.Si sebagai pembimbing kedua.
- Bapak Dr. Muhammad Al-Hamid M.Si sebagai dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Yang telah banyak memberi bantuan moril kepada penulis
- Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Yang telah banyak memberi bantuan moril kepada penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
- Seluruh Staf Pegawai dan karyawan di lingkungan FISIP UNHAS khususnya pada bagian Akademik, Tata Usaha dan Bagian Kemahasiswaan serta staf Pegawai Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
- Untuk kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Baso Faisal dan Ibunda Hasnah serta adik-adikku Fandi Faisal dan Fadli Faisal. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengertian serta perhatiannya selama ini kepada penulis. Grandmother Dr. Smith yang selalu siap menceritakan Sejarah Indonesia.
- Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Drs.Nurdin Halik dan Ibu Syamsiah S.Pdi, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil selama penyusunan skripsi penulis. Kepada saudara seperjuanganku Reski Yanti Nurdin, S.IP yang selalu menemaniku dan memberikan dukungan dalam kondisi apapun. Kepada Muh Said S,S, Arhami Hamid

S.Sos, Muh Syahrir Nurdin dan Haerul Nurdin. Terima kasih atas segala dukungan selama ini kepada penulis.

- Kepada Sepupuku Kanda Ustadz Asis dan kanda Ammy. Terima kasih atas perhatian dan doanya.
- Buat adikku tercinta Lucky Destiana Sari. Yang telah memberikan waktu, motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi penulis. **Sumanga!!!!....**
- Saudari-saudari tercintaku, Amma (leme'), wa-one (Gajah Bondeng), Kartini (Tini Toon), Ade Uwa, terima kasih telah bersamaku di semua musim.
- Teman-teman **J E M P O L 02** (Jaringan Eksekutif Mahasiswa Politik 02) Ingat kawan "Solidarity For Struggle he...he...he..." Terkhusus buat Rina, Lukman dan Eca yang seperjuangan, Fio (mace Politik), Sasty sang Bunda, Ita yang selalu bantu aku (nyelesaiin tugas), Arra Maniezt, Narti yang suka ngerepotin, Athy dan Sry yang selalu beriku wejangan, Rini...(salam Karateka..Osh), Risna dengan Radionya, Asry bondeng, Elsa Si Hitam Maniezt, *you are the best FRIEND*. Salam persahabatan kepada teman-teman cowok, Umar yang paling tampan, Guntur sang Idealis, Ichal yang Serious tapi santai, Ichul 'kadang gak nyambung', Sarby sang Pujanga Play Boy, Arman Fotografer, Dandi yang sering di tolak cewek, Ippank sang Ustadz, Anca sang Presiden BEM UH, Appink, Amir, Yasser, Rusdin, Syukur, Baim, Firman, Sahar, Ferdy, Illank, Usman, Sastra, Rahman, Hendrik, Lorent dan Ovel *Thanks For Solidarity-nya*
- Keluarga Besar Tiens dan Unicore yang memberiku arti hidup lebih dalam untuk sebuah masa depan : P'Venant, K'Rina, K'Nana, K'lit, Pipit & Fritz, Eky, Amma, Wawan, K'Aras, Nur, Oda, serta seluruh yang ada di jaringan bisnisku. Terima kasih atas motivasi dan perhatiannya.

- Keluarga Besar INKANAS (Institut Karatedo Nasional), Majelis Sabuk Hitam Maros Ica, Idar, Ria, K'Lia, K'Udin, K'Ildris, K'Ancu, K'Ulla, Wawas, Sakir, Bapak Sukino. Teman-teman Atllit Ririn, K'dian, K'Badra, Irma, Emy, Ancu (Anti Buccu), Nita, Nur, k'Ani, Teguh, K'Riri, Irjan, K'Panjul, S.Parman. Kepada Pelatih Simpae Edo, S. Tavip, S. Arif Tofan, S. Mursalim, S. Yuyun. *Salam Karateka..... OSH*
- Kanda-kanda senior Politik FISIP UNHAS terutama Untuk Abang Jack dan Kanda Anto.
- Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) FISIP UNHAS
- Teman-teman KKN REGULER GEL.71 2006 di Kecamatan Bontoa Desa Bonto Bahari (BOBA) : terkhusus Buat Marnie "Banyak Omon Lu", Wati "Eh..siapa namamu", Teguh Yang paling Baik dan bijaksana, K'Tiar sang Ketua, Zul "Zorro pahlawan semua kegiatan KKN" Jun Si Model Keren, Idam dan Lili Yang CINLOK.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa depan yang lebih baik.

Wassallamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 26 Mei 2008

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, serta tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan salawat kepada Junjungan umat manusia Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa pelita ilmu kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kerendahan hati dan diri dalam menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran secara sistematis dan bahasa ilmiah yang dimiliki penulis, dirasakan masih sangat terbatas sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis berharap dari pembaca yang budiman memohon saran dan kritikan yang sifatnya yang sifatnya konstruktif dan membangun demi kesempurnaan isi dan lebih berbobot dari skripsi ini,

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi namun berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan bimbingan dari-Nya, sumbangsih moril dan materiil dari berbagai pihak sehingga dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Dr. Deddy Tiksanawadi Tikson, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP-UH, dan sebagai Pembimbing pertama.
- Bapak A. Naharuddin, S.IP.M.Si sebagai pembimbing kedua.
- Bapak Dr. Muhammad Al-Hamid M.Si sebagai dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Yang telah banyak memberi bantuan moril kepada penulis
- Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Yang telah banyak memberi bantuan moril kepada penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Politik, Khususnya pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
- Seluruh Staf Pegawai dan karyawan di lingkungan FISIP UNHAS khususnya pada bagian Akademik, Tata Usaha dan Bagian Kemahasiswaan serta staf Pegawai Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
- Untuk kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Baso Faisal dan Ibunda Hasnah serta adik-adikku Fandi Faisal dan Fadli Faisal. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengertian serta perhatiannya selama ini kepada penulis. Grandmother Dr. Smith yang selalu siap menceritakan Sejarah Indonesia.
- Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Drs. Nurdin Halik dan Ibu Syamsiah S.Pdi, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil selama penyusunan skripsi penulis. Kepada saudara seperjuanganku Reski Yanti Nurdin, S.IP yang selalu menemaniku dan memberikan dukungan dalam kondisi apapun. Kepada Muh Said S,S, Arhami Hamid

S.Sos, Muh Syahrir Nurdin dan Haerul Nurdin. Terima kasih atas segala dukungan selama ini kepada penulis.

- Kepada Sepupuku Kanda Ustadz Asis dan kanda Ammy. Terima kasih atas perhatian dan doanya.
- Buat adikku tercinta Lucky Destiana Sari. Yang telah memberikan waktu, motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi penulis. **Sumanga!!!!....**
- Saudari-saudari tercintaku, Amma (leme'), wa-one (Gajah Bondeng), Kartini (Tini Toon), Ade Uwa, terima kasih telah bersamaku di semua musim.
- Teman-teman **J E M P O L 02** (Jaringan Eksekutif Mahasiswa Politik 02) Ingat kawan "Solidarity For Struggle he...he...he..." Terkhusus buat Rina, Lukman dan Eca yang seperjuangan, Fio (mace Politik), Sasty sang Bunda, Ita yang selalu bantu aku (nyelesaiin tugas), Arra Maniezt, Narti yang suka ngerepotin, Athy dan Sry yang selalu beriku wejangan, Rini...(salam Karateka..Osh), Risna dengan Radionya, Asry bondeng, Elsa Si Hitam Maniezt, *you are the best FRIEND*. Salam persahabatan kepada teman-teman cowok, Umar yang paling tampan, Guntur sang Idealis, Ichal yang Serious tapi santai, Ichul 'kadang gak nyambung', Sarby sang Pujanga Play Boy, Arman Fotografer, Dandi yang sering di tolak cewek, Ippank sang Ustadz, Anca sang Presiden BEM UH, Appink, Amir, Yasser, Rusdin, Syukur, Baim, Firman, Sahar, Ferdy, Illank, Usman, Sastra, Rahman, Hendrik, Lorent dan Ovel*Thanks For Solidarity-nya*
- Keluarga Besar Tiens dan Unicore yang memberiku arti hidup lebih dalam untuk sebuah masa depan : P'Venant, K'Rina, K'Nana, K'lit, Pipit & Fritz, Eky, Amma, Wawan, K'Aras, Nur, Oda, serta seluruh yang ada di jaringan bisnisku. Terima kasih atas motivasi dan perhatiannya.

- Keluarga Besar INKANAS (Institut Karatedo Nasional), Majelis Sabuk Hitam Maros Ica, Idar, Ria, K'Lia, K'Udin, K'Ildris, K'Ancu, K'Ulla, Wawas, Sakir, Bapak Sukino. Teman-teman Atllit Ririn, K'dian, K'Badra, Irma, Emy, Ancu (Anti Buccu), Nita, Nur, k'Ani, Teguh, K'Riri, Irjan, K'Panjul, S.Parman. Kepada Pelatih Simpae Edo, S. Tavip, S. Arif Tofan, S. Mursalim, S. Yuyun. *Salam Karateka...., OSH*
- Kanda-kanda senior Politik FISIP UNHAS terutama Untuk Abang Jack dan Kanda Anto.
- Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) FISIP UNHAS
- Teman-teman KKN REGULER GEL.71 2006 di Kecamatan Bontoa Desa Bonto Bahari (BOBA) : terkhusus Buat Marnie "Banyak Omon Lu", Wati "Eh..siapa namamu", Teguh Yang paling Baik dan bijaksana, K'Tiar sang Ketua, Zul "Zorro pahlawan semua kegiatan KKN" Jun Si Model Keren, Idam dan Lili Yang CINLOK.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa depan yang lebih baik.

Wassallamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 26 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Nilai Islam.....	11
B. Konsep dan Nilai Demokrasi.....	17
C. Konsep Implementasi.....	28
D. Kerangka Pemikiran	37
E. Skema Kerangka Penelitian	42
F. Defenisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian.....	44
B. Jenis Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan data.....	45
D. Teknik Analisa data.....	46

BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG ICMI

A. Histori ICMI.....	47
B. Badan-badan Otonom.....	50
C. Visi dan Misi.....	51
D. Fokus Program ICMI.....	52
E. Strategi ICMI.....	55
F. Prinsip ICMI.....	57
G. Peran dan Fungsi Ketua Umum, Sekretaris, dan Dewan Pakar	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Persamaan Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI	67
B. Peran ICMI Dalam Implementasi Nilai Persamaan	73

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

FARIDA. E 111 02 039, Islam dan Demokrasi Dalam Pespektif ICMI. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Armin Arsyad. M,Si sebagai konsultan I dan Bapak A. Naharuddin. S,IP, M,Si sebagai konsultan II.

Skripsi ini berjudul Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI. Latar belakang dari pengambilan judul skripsi ini adalah kehadiran ICMI sebagai salah satu kubu politik dalam konstalasi politik Indonesia kontemporer yang sangat menarik untuk dicermati dalam apa yang dicita-citakan oleh ICMI yakni konsep masyarakat madani yang secara implisif mengandung tidak ada perbedaan suku, agama dan ras serta kelas-kelas tertentu. Inti pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis nilai persamaan Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI dan untuk mengetahui peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan. Teori yang digunakan adalah William Ebenstain dan Aswab Mahasin.

Dalam skripsi ini yang menjadi tipe penelitian adalah deskriptif analisis dengan dasar penelitian adalah studi literatur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan data yang dipergunakan adalah secara kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas dalam penyusunan skripsi ini, maka hasilnya menunjukkan bahwa dalam pandangan ICMI, nilai persamaan Islam dan demokrasi terdiri dari dua indikator yaitu persamaan dalam perlakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan. Nilai persamaan yang dimaksudkan dalam Islam dan demokrasi adalah tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara tanpa memandang suku, agama dan ras (SARA) serta kelas-kelas tertentu, dalam berkehidupan sosial. Dan adanya jaminan hukum akan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan fikiran.

Peran ICMI dalam mengimplementasikan nilai Islam dan demokrasi sudah menunjukkan kemajuan dalam berorganisasi walaupun tidak mendekati kesempurnaan, mengingat adanya perbedaan latar belakang ideologi yang mereka miliki. Walaupun dalam ICMI mereka harus melepaskan baju ideologi yang berbeda itu, akan tetapi ego sentral tidak bisa dihapus dari individunya. Implementasi dari Islam dan demokrasi adalah kesejahteraan untuk masyarakat secara umum tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras (SARA) yaitu: implikasi demokrasi yang luhiah bagi peningkatan kesejahteraan dan implikasi kesejahteraan yang bermakna.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem politik suatu negara memang seringkali punya pengaruh yang cukup besar dalam memberi makna apa yang disebut sebagai kaum intelektual. Pada masa penjajahan Belanda, dimana sistem politik yang diterapkan sangat monolitik, kaum intelegensia Indonesia didesak oleh keadaan untuk mengambil peran dalam bentuk politik untuk menentang kekuasaan asing dan membentuk kekuasaan baru yang bebas dari kekuasaan kolonial.

Sebuah sistem politik pun memerlukan berbagai prasyarat untuk dapat diakui sebagai demokratis. Prasyarat tersebut telah dimiliki oleh Indonesia, di antaranya kelengkapan perangkat demokrasi, seperti lembaga legislatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat daerah hingga pusat, maupun jalur non-politik representasi masyarakat yang diakomodasi lewat Dewan Perwakilan Daerah. Sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, keberadaan partai-partai politik dibentuk masyarakat secara bebas tanpa intervensi apapun dari kekuasaan, hingga sistem pers bebas yang dapat memerankan fungsi-fungsi pengecekan dan keseimbangan (*check and balance*). Kepala pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat nasional telah dipilih langsung oleh rakyat. Perangkat-perangkat itulah yang telah menggerakkan roda demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penjelmaannya memiliki kekuasaan yang demikian besar, sehingga acap kali memasuki kekuasaan dalam ranah wilayah eksekutif. Sistem politik di Indonesia telah *full swing* mengarah ke sistem demokrasi.

Pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan demokrasi politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan kemajuan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas sebagaimana yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) yang dicapai, terdapat sedikit kemajuan selama beberapa tahun terakhir. IPM Indonesia kini berada diperingkat 108 di antara negara-negara di dunia setelah beberapa tahun sebelumnya pada tingkat 110. Namun peringkat tersebut masih sangat rendah dibanding negara-negara tetangga di Asia tenggara seperti Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dengan seluruh potensi yang dimilikinya, Indonesia semestinya dapat mencapai tingkat 90 atau bahkan lebih baik dalam tempo yang tidak lama. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemajuan demokrasi politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum cukup nyata memberi pengaruh pada kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Seharusnya seperti dikemukakan terdahulu bahwa demokrasi berjalan beriringan dengan kesejahteraan. Soekarno, M.Natsir, Mohammad Hatta, Tan Malaka dan Sutan Syahrir tak pelak lagi merupakan monumen



dan sekaligus teks dari suatu zaman di mana kaum intelegensia, atau kaum elit terdidik, sebagai konsekuensi dari tanggung jawab intelektualnya, harus membentuk kekuasaan negara untuk kesejahteraan masyarakat mereka. Walhasil, tidak sedikit dari kaum intelektual radikal pada masa penjajahan ini kemudian berubah status menjadi "elit politik" atau "kelas penguasa".

Di sinilah kontroversi mengenai peran dan hakikat intelektual bermula. Ketika Indonesia merdeka, dan kaum intelegensia atau kaum terpelajar kita dituntut kehadirannya untuk mengisi kemerdekaan, maka mau tidak mau kaum intelegensia harus berurusan dengan kekuasaan. Masalah yang kemudian terjadi ketika kaum intelegensia kini menjalankan misinya sebagai kaum intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaan, dan akhirnya menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Atau tidak mempedulikan rakyat kecil lagi.

Kehadiran ICMI sebagai salah satu kubu politik dalam konstalasi politik Indonesia kontemporer sangat menarik untuk dicermati. Dalam hal ini, kehadirannya adalah mencoba menjadi wakil (corong suara) umat Islam secara khusus dan masyarakat Inonesia secara umum. Apalagi, kalangan Muslim sebagai sebuah entitas politik yang solid, yang mampu mempengaruhi opini publik maupun kebijakan publik sudah lama absen sejak rezim Orde Baru mencanangkan program depolitisasi massa rakyat, mulai dengan dicairkannya kekuatan-kekuatan yang membangun orde ini diawal 1970-an.

Di tengah konflik sosial demikianlah ICMI muncul dengan aktifitas politiknya. Sebelum munculnya ICMI, kalangan Muslim lebih terkenal sebagai sebuah kekuatan yang cenderung radikal. Radikalisme yang muncul di Aceh kemudian Lampung dan Tanjung Priok adalah fenomena yang mengukuhkan mitos tersebut. *Performance* "garis keras" ini muncul lebih merupakan bentuk ketidakpuasan kelompok politik Muslim yang tidak mendapatkan bagiannya setelah mereka (beraliansi dengan kekuatan politik kontra Soekarno dan PKI lainnya) memenangkan "perang" melawan Orde Lama. Padahal, menurut mereka, tumbanganya Orde Lama juga atas ke-ikutsertaan mereka di front depan. Jadi mereka merasa berhak untuk juga berbagi hasil atas kemenangan aliansi kekuatan politik itu.

Kemunculan ICMI bila diperiksa lebih jauh sebenarnya memancing beberapa perdebatan menarik. Secara khusus seorang pengamat politik dari UGM pernah berkata, *"the dilemma for moslems is that they want to play politic but they are always in a position to be co-optated"* Dalam situasi sekarang, ketika tuntutan akan demokratisasi muncul dimana-mana, kemunculan ICMI dipertanyakan kembali jika dia tidak mampu memberikan respon politik terhadap tuntutan-tuntutan "arus bawah" tersebut. Termasuk jika ada gugatan bagaimana komitmennya terhadap problem obyektif rakyat Indonesia di tengah kapitalisme yang eksploitatif.

Kemudian bagaimana perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan ICMI, Dimana setiap warga negara yang resmi dan sah mempunyai

hak politik yang sama. Hak dipilih untuk jabatan tertentu, hak berpendapat, serta berkumpul. Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dan hak dalam memperoleh kesempatan yang sama pula, tanpa pembedaan suku, agama, dan ras, serta kelas-kelas tertentu. Jika hal tersebut telah dapat terealisasi, konflik-konflik yang ada dapat diminimalisir sehingga pembangunan untuk kesejahteraan warga negara bisa berjalan secara optimal.

Namun realita yang ada, pembedaan hak warga negara sangat jelas, misalnya dalam hal perlakuan, sehingga konflik tidak dapat terhindarkan dan pembangunanpun tidak dapat berjalan dengan baik.

Melihat fenomena di atas, maka dirasakan perlu untuk mengkaji sebuah penelitian Islam dan demokrasi (persamaan) dari sudut pandang ICMI di Indonesia, termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah individu dan organisasi tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 2 masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi berdasarkan perspektif ICMI ?
2. Bagaimana peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Menggambarkan dan menganalisis nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi berdasarkan perspektif ICMI.
2. Mengetahui peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat akademik

- a. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya yakni digunakan sebagai informasi bahan perbandingan dalam kajian Islam dan demokrasi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang berniat meneliti hal yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan pengetahuan dan pengamatan studi lapangan diharapkan organisasi ICMI sebagai organisasi yang sejalan dengan nilai Islam dan demokrasi demi terwujudnya demokratisasi di Indonesia.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pihak lain yang tertarik untuk meneliti dengan topik dan kajian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli, maupun website banyak digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai dengan pendapat dari para ahli yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari Max Weber tentang agama dan kapitalisme. Dalam teorinya, Weber banyak mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, terutama pada sistem ide-ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Weber memandang gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dunia ekonomi. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904-05/ 1958), ia memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap

sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan itu merintangi perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-masing. (Goerge Rither. 2003 : 35)

Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat melukiskan cara berfikir Weber dengan satu contoh lain-rasionalisasi institusi ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas tentang hubungan antara hukum dan kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan luas, weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marxis dalam upaya untuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukanlah sebuah epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah (Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia yang ia kaji, Weber menemukan sistem agama yang lebih irrasional (misalnya, Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional.

Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu memberikan rintangan sementara, karena sistem ekonomi- dan bahkan seluruh struktur sosial – masyarakat pada akhirnya akan menjadi rasional. (ibid :40)

Berdasarkan teori tersebut, penulis memberikan analisis tentang tumbuhnya semangat kapitalisme dikalangan umat kristen protestan di Barat, dikarenakan adanya keyakinan dikalangan para pembesar agama kristen tersebut, Dimana lebih menekankan bahwa ide-ide kapitalisme sangat berhubungan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka.

Hal tentang agama dan kapitalisme juga terdapat dalam ajaran Islam. Dalam Hadist sahih yang artinya tuntutlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok . juga terdapat dalam surah Al Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya (9) hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (10) apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Contoh empirik yang dapat kita lihat yaitu riwayat hidup nabi Muhammad SAW sebagai menerima dan menyampaikan wahyu bagi seluruh umat manusia juga adalah seorang manusia yang wajib memenuhi

kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan beliau dan sahabat-sahabatnya menjadi pedagang.

Dizaman modern seperti sekarang ini ideologi kapitalisme dalam Islam dapat kita lihat ketika seorang ustaz berdakwah di mesjid atau tempat-tempat lainnya, membutuhkan imbalan berupa materi untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam demokrasi, kapitalisme dan demokrasi itu sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Perdebatan tentang demokrasi dan pembangunan mengemuka sejak negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara berhasil membangun negerinya dari kehancuran Perang Dunia II. Demokrasi dianggap memiliki hubungan resiprokal dengan pembangunan yang sukses diterapkan diwilayah tersebut. Semour Martin Lipset mengkonseptualisasikan fenomena tersebut ke dalam teorisasi hubungan modernisasi dan demokrasi yang terkenal. Barrington Moore Jr, dengan karyanya menyuarakan pentingnya kelas borjuasi sebagai pilar utama demokrasi. *"tidak ada borjuis berarti tidak ada demokrasi"*.

Hasil positif pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara oleh Lummis berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih pesat jika dilaksanakan di bawah alam demokrasi. Keyakinan ini bermuara pada kenyataan bahwa negara-negara yang relatif makmur sekarang ini adalah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. (Suyatno 2004 :31-32)

Berdasarkan teori tersebut, menurut hemat penulis bahwa demokrasi itu hanya dapat tumbuh di masyarakat yang tingkat ekonominya sudah mapan. Karena ketika masyarakat masih berada dalam ruang kemiskinan maka kestabilan demokrasi tidak akan pernah terwujud, disebabkan masyarakat hanya memikirkan masalah pemenuhan kebutuhan pribadi.

Berikut akan dijelaskan beberapa teori tentang konsep Islam, konsep demokrasi, konsep implementasi, kerangka pemikiran, skema alur fikir dan definisi operasional yakni :

A. Konsep dan nilai Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:388) Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

Sementara itu kata Islam (*Al-Islam*) secara etimologis mempunyai konotasi takluk (*inqiyad*) dan berserah diri kepada Allah (*Istislam Li Allah*). Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyariatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata Islam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut:

"Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah ku Ridhai Islam untuk menjadi agama bagimu". (QS Al-Maidah (5):3). Karena itu secara syar'i Islam adalah agama diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Muhammad SAW,



untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan penciptanya meliputi masalah-masalah aqidah dan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi akhlak, makanan dan pakaian, hubungan manusia dengan sesamanya meliputi muamalat dan persanksian.

Dengan demikian, Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia, tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia yang biasa disebut aqidah Islam.

Dengan definisi syariat Islam baik secara etimologis maupun terminologis syar'i di atas, tampak jelas bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah maupun peraturan atau sistem kehidupan yang menjadi turunannya.

Aqidah Islam adalah keimanan kepada Allah SWT dan para malaikat-Nya, para kitab-kitabnya: kepada para Rasul-Nya; serta pada hari akhir dan takdir baik dan buruknya berasal dari Allah SWT semata. Aqidah Islam juga meliputi keimanan pada adanya surga dan neraka serta seluruh perkara yang berkaitan dengan semua itu. Demikian juga dengan hal-hal ghaib dan apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh indera yang berkaitan dengannya. Aqidah

Islam merupakan pemikiran yang sangat mendasar (*fikrah asasi*). Ia mampu memisahkan secara shahih problem mendasar manusia dari mana manusia berasal, untuk apa manusia ada dan mau kemana setelah manusia mati. Artinya aqidah Islam merupakan pemikiran yang menyeluruh (*fikrah kulliyah*) yang menjadi sumber dari seluruh pemikiran cabang. Ia adalah pemikiran mendasar yang membahas persoalan di seputar alam semesta, manusia, dan kehidupan dengan pencipta dan hari akhir. Dalam konteks manusia, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dirinya sebagai hamba Allah yang dutus ke bumi untuk menegakkan perintah-perintah Allah.

Sebagai agama, Islam terdiri dari keyakinan atau iman dan rasa memiliki, dan dalam praktiknya kedua unsur tersebut saling berinteraksi. Dalam interaksi ini, kehidupan sosial dan politik umat Islam didefinisikan secara berbeda-beda di kalangan kaum Muslim itu sendiri. Dalam hubungan itu, penafsiran atas konsep syariah sangat krusial. Syariah berarti "jalan menuju air, yakni jalan menuju sumber kehidupan" (Rahman, 1979: 100). Dalam konteks ini, sumber kehidupan adalah Allah sendiri. Berbicara secara lebih teknis lagi tentang syariah sebagai "nilai-nilai agama, yang diungkapkan secara fungsional dan dalam istilah-istilah yang nyata, untuk mengarahkan kehidupan manusia, yang telah ditentukan oleh Allah dimana manusia harus menjalani hidup dengan mewujudkan kehendak Allah. Syariah mencakup semua perilaku-spiritual, mental, dan psikis serta mencakup iman dan amal."

Dalam konsep Rasyid Ridha (Eyanat, 1982) yang cukup berpengaruh tentang negara Islam, syariah memainkan peran penting, dan otoritas untuk menafsirkannya hanya ada pada ahl al-hall wa al-'aqd, yaitu otoritas keagamaan atau ulama (ibid:72). Meskipun demikian Rasyid Ridha membedakan syariah ke dalam dua wilayah: wilayah ibadah dan wilayah mu'amalah (hubungan sosial dan transaksi duniawi). yang terakhir ini menjadi wilayah musyarah para pengambil keputusan, dan karenanya, produknya adalah hukum manusia (ibid. 79).

Dalam negara Islam, menurut Ridha, para pengambil keputusan adalah seorang ulama. Ia berargumen bahwa ulama "idealnya diposisikan untuk berperan sebagai wakil alamiah dan asli dari umat Islam" (ibid.:77). Para wakil ini mempunyai otoritas untuk memilih pemimpin nasional (khalifah). Sayangnya Ridha tidak menjelaskan dengan tegas tentang masalah siapa yang akan memilih wakil-wakil ini, meskipun ia menyatakan bahwa "umat adalah jantung dari kekuasaan nasional" (ibid. 83).

Dari penjelasannya, penulis melihat Ridha hanya berteori secara parsial, tanpa melihat solusi dari masalah yang dia sajikan sendiri. Alasannya, karena konsep ulama yang dia jelaskan tidak secara gradual digambarkan tentang spesifikasi ciri-ciri, sifat dan sikap secara jelas seperti apa ulama yang baik yang dia maksudkan. Kemudian apakah ulama ini memiliki kapabilitas yang baik dalam menjalankan syariah sesuai dengan konteks kemasyarakatan saat ini.

Dalam kasus syi'ah, yang dianut mayoritas rakyat Iran, pemimpin umat hendaknya seorang imam. Sayangnya, dalam pandangan syi'ah imam masih menghilang (ghaib), dan karenanya seseorang yang menguasai hukum harus memimpin seraya menunggu datangnya imam, dan orang tersebut adalah ulama. Gagasan Khomeini tentang wilayah al-faqih dikembangkan dari keyakinan tersebut (Arjomand, 1993). Ulama (*faqih*) harus memimpin negara yang menjalankan syariah.

Kekuasaan ulama ini juga ditemukan dalam konsep al-Maududi(1976) tentang teo-demokrasi. Al-Maududi, pendiri jama'at-I Islami Pakistan, dalam karyanya *The Political Theory of Islam*, merinci tiga prinsip:

1. Tidak ada orang, kelas atau kelompok, bahkan semua warga negara secara keseluruhan, dapat mengklaim kekuasaan. Hanya Allah-lah penguasa yang sesungguhnya; selain-Nya hanyalah makhluk Allah;
2. Allah adalah pemberi hukum yang sesungguhnya dan kekuasaan legislasi yang absolute hanya ada pada-Nya. Orang-orang beriman tidak dapat membuat aturan dengan benar-benar bebas, juga tidak dapat memodifikasi hukum apapun yang telah diturunkan oleh Allah, bahkan jika ada keinginan untuk memberlakukan hukum seperti itu atau mengubah hukum Tuhan tersebut dengan suara bulat.
3. Sebuah negara Islam harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi-Nya. Pemerintah yang menjalankan negara seperti itu layak ditaati dalam kapasitasnya sebagai suatu agen

politik yang dibentuk untuk menerapkan hukum Allah dan hanya sejauh itu negara bertindak. Kalau negara itu tidak menghiraukan hukum yang telah diwahyukan Allah, perintah-perintahnya tidak mengikat orang-orang beriman (al-Maududi, 1976: 271).

Al-Maududi menyatakan bahwa ulama adalah orang yang paling mengetahui hukum Allah, dan karenanya ulama harus menjadi anggota legislatif. Al-Maududi menyatakan bahwa umat Islam harus memilih diantara ulama yang dianggap paling menguasai hukum Allah. Keterlibatan umat Islam dalam memilih ulama menjadi konsep teokrasi "demokratif" dalam konsep teo-demokrasi, dengan anggota legislatif hanya terdiri dari ulama, dan rakyat memilih para calon anggota legislatif dari kalangan ulama tersebut

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pakar Islam yang juga negarawan ataupun politikus di beberapa negara Islam, pendapat yang disampaikan cenderung hampir sama dari segi esensinya yakni Teo-demokrasi. Dengan melihat bahwa hanya Allah SWT, sebagai penguasa dari seluruh kehidupan di dunia ini. Adapun Al-Quran sebagai pedoman dan sumber dari sumber hukum, juga hadits sebagai pemberi penjelasan yang lebih dari bahasa ambigu Al-Quran. Yang pembawa wahyunya adalah malaikat, dan para nabi sebagai suri tauladannya karena mengajarkan nilai-nilai keTuhanan dan kemasyarakatan. Para ulama adalah orang yang berperanan penting, karena sebagai imam agama dan imam pemerintahan. Yang nantinya para ulama ini dipilih oleh rakyat, berdasarkan kemampuannya sebagai orang yang paling

mengetahui hukum Allah. Dengan tidak melihat latar belakang etnis, suku maupun ras-nya akan tetapi berpegang teguh pada seberapa besar keimanan dan kemampuannya dalam mengurus umat. Nilai-nilai persamaan menjadi lebih penting, karena di mata Allah SWT semua hambanya adalah sama, yang membedakan hanya kadar keimanan dan ketakwaannya

B. Konsep dan nilai Demokrasi

Diketahui secara umum bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, berasal dari Yunani, yaitu pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*). Sebagai sistem untuk mengelola negara, akar sejarahnya dapat dilacak hingga masa Plato, filosof Yunani dari masa sekitar abad keempat sebelum Masehi. Selama dua ratus tahun sistem pemerintahan ini dijalankan di Atena, sampai kota ini diduduki oleh Macedonia. Sejak itu, demokrasi tenggelam dalam sejarahnya dan baru muncul kembali sekitar tiga abad yang lalu sebagai konsep politik (William, 1976).

Konsep demokrasi menekankan pada kedaulatan tertinggi untuk mengelola kehidupan suatu bangsa atau negara adalah di tangan rakyat. Setiap orang memiliki posisi yang sama untuk menentukan ke arah mana suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah. Dengan konsep ini pengambilan keputusan untuk seluruh masyarakat bukan di tangan satu atau beberapa orang tertentu saja yang dianggap memiliki kedaulatan mutlak atas masyarakat dan bangsanya. Hak pengambilan keputusan itu justru berada

pada diri setiap orang yang dilaksanakan oleh representasi suara terbanyak masyarakat itu.

Konsep demokrasi seperti itu secara langsung menolak pandangan bahwa terdapat orang tertentu yang memiliki kedaulatan penuh atau berhak untuk mengambil keputusan bagi masyarakat atau bangsanya seperti yang dianut sistem monarkhi atau kerajaan sebagai salah satu bentuk kekuasaan otokrasi. Konsep demokrasi juga menolak pandangan teokrasi yang menempatkan orang-orang tertentu memegang kedaulatan penuh atas rakyat dengan mengatasnamakan Tuhan. Dalam Demokrasi, tidak ada satupun manusia yang berhak mengatasnamakan Tuhan untuk mengambil keputusan bagi masyarakat. Suara rakyat-lah yang lebih dipandang mewakili 'suara Tuhan', '*vox populi vox dei*'. Dalam sejarah modern, praktek demokrasi mendapatkan legitimasi yang kuat melalui Revolusi Prancis di abad 18 yang menegaskan prinsip kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan: *liberte, egalite, fratermine*.

Arti dan makna demokrasi itu sendiri ditinjau dari berbagai sudut pandang dan falsafah dapat melahirkan bermacam penafsiran dan defenisi. Lawan demokrasi adalah otokrasi. Seperti juga demokrasi, otokrasi ada banyak varian dan hibridnya. Tidak jarang sistem otoriter menggunakan nama demokrasi, misalnya Republik Demokrasi Korea (Korea Utara) dan Demokrasi Vietnam, yang jelas tidak menganut sistem demokrasi. Sebaliknya ada pemerintahan dengan sistem monarki, yang dalam sejarah ingin dilawan

dengan demokrasi (misalnya Revolusi Prancis) , sekarang sudah masuk ke dalam kelompok demokrasi (meskipun dengan monarki diakui bahwa tidak semua dilahirkan sama).

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberti* (kebebasan), hukum *right* (hak asasi manusia), dan seterusnya.

Dibawah ini akan diberikan beberapa defenisi yang mencoba memecah beberapa variabel yang menjadi variabel-variabel kunci yang dapat dilihat secara komparatif. Variabel-variabel tersebut antara lain; 1) bentuk pemerintahan yang berbahaya; 2) kompetisi yang sesungguhnya dalam mengejar kekuasaan; 3) mengizinkan partisipasi massa yang bersifat setara; 4) memberikan kebebasan sipil dan kebebasan lainnya yang membatasi kekuasaan negara atas masyarakat. Dapat penulis kemukakan beberapa pendapat tersebut antara lain;

Aristoteles dalam Suyatno (2004:33) : "sebuah konstitusi (*politea*) barangkali diartikan sebagai sebuah organisasi dari sebuah negara-kota (*polis*) yang secara umum memberikan perhatian pada pejabatnya saja, khususnya pada pejabat yang memiliki kedaulatan dalam keseluruhan masalah...Dalam demokrasi negara kota misalnya, rakyatlah (*demos*) yang berdaulat...Ketika rakyat memerintah negara-kota dengan memiliki

pandangan terhadap kepentingan umum, bentuk pemerintahannya disebut dengan nama umum... Pemerintahan yang konstitusional ... Demokrasi

H.L. Mencken dalam Suyatno (2004:34): "Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat."

G.B. Shaw dalam Suyatno (2004:34) : "Demokrasi adalah 'pemilu pengganti' oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan diselewengkan."

Oxford English Dictionary dalam Suyatno (2004:34) : "Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat... atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat."

E.E.Schattschneider dalam Suyatno (2004:34) : "Demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan."

Adam Przeworski dalam Suyatno (2004:34): "Demokrasi adalah bentuk institusionalisasi konflik yang terus menerus...(dan) ketidakpastian, menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu. Adanya yang dikelola oleh aturan-aturan dan adanya periode pemenang dan pecundang."

Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam Suyatno (2004:34) :
"Demokrasi adalah sistem politik dimana kelompok-kelompok yang berbeda secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi untuk mengejar kekuasaan dan dimana pemegang kekuasaan institusional dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. "

Robert Dahl dalam Suyatno (2004:35) : "Demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif, 2) setara dalam hak suara, 3) mencapai pemahaman yang baik, 4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda, dan 5) melibatkan orang dewasa. Insitusi-institusi politik penting untuk mencapai tujuan-tujuan; 1) pejabat terpilih, 2) pemilu yang bebas, adil dan rutin, 3) kebebasan berpendapat, 4) adanya sumber informasi alternatif, 5) otonomi asosiasional, dan 6) kewarganegaraan yang inklusif."

Pendapat Robert Dahl sangat utopis apabila dilihat dari konteks ke-Indonesiaan, mengingat terkadang pesta demokrasi yang ada di Indonesia justru sering melibatkan anak-anak kecil sebagai penggembarannya. Keterlibatan orang dewasa juga tidak jelas, karena ukuran kedewasaan disini apakah dilihat dari segi umurnya atau dari sifatnya.

Ian Saphiro dalam Suyatno (2004, 35) : "kaum demokrat adalah mereka yang komitmen terhadap pemerintahan oleh rakyat. Mereka mendesak bahwa bukanlah para aristokrat, kaum monarki, filsuf, birokrat, ahli atau para pemimpin agama yang memiliki hak untuk menekan rakyat untuk menerima konsepsi umum tentang kehidupan yang pantas. Rakyat

seharusnya memutuskan untuk dirinya sendiri, melalui prosedur yang tepat dalam keputusan kolektif, apa yang seharusnya mereka dapatkan secara kolektif."

Defenisi-defenisi diatas yang merentang dari yang berpandangan minor (Aristoteles, Mencken, dan Shaw) hingga ke pandangan optimis, meski telah dicoba dalam beberapa variabel, acapkali masih membingungkan untuk memperoleh gambaran utuh sesungguhnya konsep demokrasi. Hal ini dapat dimaklumi karena teorisasi demokrasi sebenarnya telah menempuh usia yang sangat tua, mulai zaman Yunani Kuno hingga masa kini, dan terus menerus tumbuh kembang secara pesat dan dialektis. Namun demikian variabel-variabel di atas dapat menolong pemahaman dini tentang postur demokrasi. Defenisi-defenisi nampaknya terkesan sederhana, tetapi sebenarnya sejarah gagasan demokrasi sangatlah kompleks dalam praktiknya.

Menurut penulis sendiri, dari pengertian beberapa pakar yang ada memiliki inti yang hampir sama yakni bagaimana menjalankan kekuasaan dengan cara yang baik dan adanya cara-cara manipulatif untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan membawa kepentingan rakyat sebagai alasannya, agar mendapatkan simpati dan empati. Teori yang ada dari pakar di atas tentunya di dasarkan dari konteks sesuai zamannya. Sehingga konsep demokrasi yang betul sampai saat ini masih samar-samar untuk mendapatkan

kesimpulan yang pasti. Akan tetapi hanya bisa dipahami sesuai dengan gejala-gejala yang ada dan realitanya.

Demokrasi kemudian mengandung prosedur-prosedur demi untuk mencapai keputusan secara kolektif dalam suasana menjamin penyertaan secara maksimal yang boleh tercapai bagi mereka yang berkepentingan, termasuklah kepentingan berikut:

1. Kepentingan hak untuk sama rata (persamaan)
2. Kepentingan golongan mayoritas yang memerintah dan jaminan kepada hak yang minoritas. Ini adalah untuk memastikan keputusan kolektif disetujui oleh sebagian besar suara untuk membuat keputusan tersebut.
3. Prinsip undang-undang
4. Jaminan untuk kebebasan berkumpul dan memberi pendapat dan hak-hak kebebasan lain yang akan membantu menjamin siapa yang akan membuat keputusan atau dipilih untuk membuat keputusan supaya boleh memilih dari pilihan-pilihan terbaik.

Demokrasi sebenarnya cara atau metode untuk mencegah satu pemerintahan yang terus menerus ingin berkuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Atau dengan kata lain yang berbeda sedikit, politik demokrasi modern ialah pemerintahan dengan pemerintah dipertanggungjawabkan dalam tindakan mereka dihadapan orang awam dari rakyat jelata yang bertindak secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam satu masa pemilihan dan permufakatan.

Sedangkan bagi pemikir-pemikir Islam, defenisi yang dipahami dari demokrasi adalah sesuai dengan nilai-nilai syura yang diamalkan dalam ajaran Islam. Walau demikian ada di kalangan pemikir Islam yang menganggap dengan keyakinan penuh demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Demokrasi juga bermaksud penguasa politik dan segala hak politik diserahkan kepada rakyat. Demokrasi juga bukan saja bentuk kerajaan tetapi juga satu bentuk masyarakat. Namun ada sebagian pemikir Islam mendesak supaya umat Islam tidak berfikir secara dikotomi demokrasi maupun diktator saja tanpa melihat elemen-elemen Islam seperti syura, keadilan, persamaan yang lebih lengkap dan mantap sifatnya sudah tentu ia jauh daripada sempurna.

Sudah banyak sekali teori-teori tentang demokrasi yang sudah dirumuskan oleh para penulis, sehingga Robert Dahl dalam Suyatno (2004:35) menulis bahwa

"...there is no democratic theory-there are only democratic theories."

Boleh dikatakan bahwa setiap penulis yang membahas demokrasi memberikan pandangannya sendiri tentang pengertian dan ciri-ciri demokrasi. Tapi untunglah bahwa pendapat para penulis tersebut tidak berbeda banyak sehingga semua pendapat tersebut hanyalah berbeda dalam istilah dan penekanannya. William Ebenstein dalam Maswadi Rauf (1997) menyebutkan psikologi demokrasi dari konsep Demokrasi Barat, yakni

(1) empirisme rasional, (2) penekanan pada individu, (3) negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (*voluntarism*), (5) hukum di atas hukum, (6) penekanan pada cara, (7) persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, dan (8) persamaan semua manusia.

Henry B. Mayo dalam Maswadi Rauf (1997) mencatat ada paling tidak Sembilan nilai yang mendasari demokrasi yakni: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara sukarela, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (5) adanya keanekaragaman, (6) tercapainya keadilan, (7) yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan, (8) kebebasan, dan (9) adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Menurut Amir Santoso ada empat prasyarat demokrasi, yakni: (1) *equality* (persamaan), (2) *rule of game*, (3) bertoleransi terhadap perbedaan, dan (4) kelas menengah yang kuat. Prasyarat ini sangat bagus dilihat dari onsepnya walaupun dalam segi empiriknya tidak berbanding lurus. Penulis lainnya menganggap bahwa ada enam ciri penting dari sebuah rezim demokrasi: (1) hak suara yang luas, (2) pemilihan umum yang bebas dan terbuka, (3) kebebasan berbicara dan berkumpul, (4) *rule of law*, (5) pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan (6) badan pengadilan yang bebas.



Untuk melengkapi berbagai ciri dan pengertian demokrasi, Samuel Huntington dalam Saiful Mujani (2007:14) berpendapat bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Definisi ini ternyata memberikan ciri-ciri demokrasi lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya karena hanya menekankan pada pemilu yang adil, jujur, berkala dan kompetitif serta adanya hak pilih bagi rakyat.

Berbagai macam ciri demokrasi yang pada dasarnya tidak berbeda secara prinsipil dan setiap butir saling melengkapi. Meskipun ada beberapa yang sama, ciri yang bermacam-macam itu di dasarkan atas dua konsep dasar dalam demokrasi yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Konsep persamaan dan kebebasan diantara semua manusia melahirkan beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan oleh para ahli di atas. Konsep kebebasan/persamaan dalam hubungan antar manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala dan

kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan yang bebas.

Ciri-ciri demokrasi yang disebutkan diatas penulis menganggap sebagai prosedur atau tata cara yang mencakup empirisme rasional, kesukarelaan, perselisihan`diselesaikan secara damai dan melembaga, perubahan secara damai, pergantian pemimpin secara teratur, dan penggunaan kekerasan secara minimum. Semua ciri ini tidak berkenaan secara langsung dengan kebebasan/persamaan atau kedaulatan rakyat, namun merupakan indikator bagi tegaknya demokrasi. Sebagai contoh, demokrasi menginginkan diselesaikannya perselisihan politik secara damai, bukan dengan jalan kekerasan. Bila cara-cara kekerasan masih sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan politik, berarti nilai-nilai demokrasi masih belum berkembang dengan baik di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat selalu menjadi korban dari proses dari yang namanya demokrasi. Elit sebagai orang yang bertanggung jawab penuh seolah-olah tidak peduli sekalipun terkadang mengkhianitaskan atas nama rakyat ketika masalah-masalah yang ada tidak dapat diselesaikan. Demokrasi kemudian menjadi Tuhan baru bagi elit untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.

C. Konsep Implementasi

Menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: *syura*, *musyawarah*, *amanah*, *masulliyah* dan *hurriyah*.

Pertama, *syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahli halli wa-l'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah (Madani, 1999:12). Jelas bahwa *musyawarah* sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap mengeluarkan setiap keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap *musyarawah* juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan

secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Artinya pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. As-syura:15; al-Maidah:8; An-nisa':58. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrim" berbunyi: "negara yang berkeadilan akan lestari meskipun ia negara kafir, sebaliknya negara zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatas namakan) Islam" (Madani, :14).

Ketiga, *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama, memahami *al-Musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*. Diantara dalil Al-qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13.

Keempat adalah *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dengan konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT. dalam surat an-Nisa':58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut disinilah etika islam.

Kelima, *al-Masuliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggung jawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggung jawabkan di depan Allah SWT.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (*al-Masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat

luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayanan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-Akhlaq al-Karimah dan dalam rangka al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

Jika suatu negara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh

sebagian penguasa Bani 'Abbasiyyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam adalah agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafurrasyidin (Mahasin, 1999:31).

Menurut John L. Esposito (2003), dalam tatanan demokrasi, para aktivis, partai politik, asosiasi profesional, pendidikan, keuangan, pelayanan kesehatan, organisasi hak asasi manusia bisa untuk terlibat. Soalnya dalam sistem ini, pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut Olivier Roy dalam buku *globalised Islam: The Search for a New Ummah* (2004) menyatakan bahwa perdebatan pada istilah atau konsep Islam dengan demokrasi pada saat ini bukanlah menjadi persoalan yang terlampau penting. Yang lebih penting adalah persoalan dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dan praktik demokrasi. Tentu saja, ini berlaku pada sepanjang waktu, kalangan atas dan bawah, serta dalam keadaan damai atau konflik. Sebab, demokratisasi akan bisa ditegakkan pada masyarakat nyata, jadi bukan pada hal atau visi abstrak yang diinginkan masyarakat.

Pada wilayah ini, maka para aktor demokrasi yang berbeda mesti memberikan pemahaman internal tentang konsep yang selanjutnya ditrasformasikan menjadi hal yang praktis dan dipahami masyarakat. Jadi, bukan hanya selalu melakukan permainan retorika istilah atau definisi administratif yang membingungkan rakyat. Pernyataan Olivier Roy (1994) itu memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sebab, bila demokrasi betul-betul bisa dilaksanakan secara prosedural dan substansial, maka partisipasi publik yang luas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk rakyat bisa menjadi kenyataan. Jadi, persoalan pengertian dan cakupan demokrasi memang sebenarnya sangat melindungi hak dan kedaulatan rakyat. Dan semua aturan itu bisa dinegosiasikan lewat cara-cara yang beradab dan terbuka. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah melakukan praksis demokrasi lewat aktor-aktor dan institusi yang bisa mendukungnya.

Berikut ini adalah tiga aliran pendapat dalam kategori penerimaan dan penolakan terhadap demokrasi dari tinjauan Islam, yaitu

1. Golongan menolak demokrasi secara mutlak yaitu menanggapinya sebagai satu peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Antara pendukung pendapat ini adalah *Taqiyuddin al-Nabhani*, Pengaggas Hizbut Tahrir Islam dalam bukunya *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 1989 yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah bertentangan dengan 'akidah islamiah. Mereka mendakwa bahwa tidak ada apa-apa dalam tradisi Islam

yang serasi dengan kerajaan berperlembagaan dan perwakilan. Demokrasi juga merupakan legalitas dari imperialis negara barat.

2. Golongan yang bersetuju dengan demokrasi secara mutlak. Golongan ini ialah Syeikh Muhammad Husein dalam artikelnya *Tantih al-Ummah wa Tanziyah al-millah* yang menyeru berpegang kepada demokrasi sebagai satu wasilah untuk menumbangkan diktator. Menurutnya, diktator terbagi dua yaitu, diktator politik dan diktator agama, dan diktator agama adalah yang paling sukar dihapuskan.

3. Golongan ini tidak menerima atau menolak secara mutlak. Mereka membedakan demokrasi sebagai alat dengan demokrasi sebagai bentuk pegangan. Golongan ini semakin mendapat tempat di kalangan umat Islam sekarang ini. Termasuk dalam golongan ini seperti Muhammad Khatami, Presiden Iran, Muhammad Mahdi Syamsuddin, seorang ulamak syiah, Yusuf al-Qardhawi, Rashid al-Ghannoushi, Taufiq al-Shawi dan Hassan al-Tubari pendukung demokrasi Islami menekankan konsep-konsep syura, bai'ah permufakatan, ijtihad dan masalah untuk menunjukkan bahwa Islam tidak kekurangan dalam landasan-landasan asas yang cocok dengan tata cara dan maklumat demokrasi.

Di Indonesia sendiri, gerakan penolakan akan demokrasi yang paling tajam adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan anak cabang dari Hizbut Tahrir yang bermarkas di Palestina. Organisasi gerakan Islamis ini berjuang untuk menghidupkan kembali kekhilafan, yakni sebuah konsep

politik yang diklaim di dasarkan pada al-Quran dan Sunnah yang telah diwujudkan dalam sejarah kerajaan Islam yang panjang. Sejak nabi Muhammad SAW sampai kejatuhan imperium Utsmani. Dengan pemahaman mereka yakni Khilafah Islamiyah, yang berlandaskan akan hukum Allah dan bukan milik rakyat. Organisasi ini seringkali mendemonstrasikan perhatiannya tentang pentingnya syariah Islam pada masyarakat Indonesia melalui aksi-aksi bersama.

Apa yang disebut demokrasi adalah sama apa yang disebut dalam ajaran Islam tentang keadilan, hak, perundingan dan persamaan. Ini karena pemerintahan demokrasi memberi perhatian kepada elemen-elemen keadilan dan kebenaran kepada rakyat dan rakyat berpartisipasi dalam menentukan perkara tersebut.

Dr. Taufikal-Shawi menjelaskan bahwa demokrasi yaitu sistem politik dan kenegaraan tetapi konsep shura dalam Islam lebih meluas dari itu karena ia merupakan bentuk proses pendidikan akhlak bagi individu, masyarakat untuk beriltizam dengan perbincangan dalam segala aspek. Shura merupakan pembinaan akhlak, perangai dan nilai-nilai kemasyarakatan. Ia tidak terhadap dalam sistem kenegaraan. Syariat Islam telah mendahului sistem demokrasi dalam membuat dasar-dasar pemerintahan karena ia menjadikan *ahli al-Hall wa al-'aqd* sebagai wakil umat dalam memilih pemimpin atau mengawasinya. Selain itu, prinsip pemisahan antara perundangan dan pemerintahan adalah perbezaan yang substansial bagi

sistem Islam, karena ia berkaitan dengan kedaulatan syariat atas pemerintah dan kemandiriannya dari para penguasa. Ini merupakan ciri khas yang membedakan syura Islamia dan menjadikannya lebih progresif daripada sistem demokrasi sekarang.

Bagi golongan yang menolak demokrasi dan menanggapnya sebagai satu kemungkaran karena mengamalkan konsep 'hukum rakyat untuk rakyat' yang berganti dengan konsep 'hukum hanya milik Allah' adalah satu anggapan yang tidak boleh diterima menurut al-Qardhawi. Menurutnya, prinsip 'hukum untuk rakyat' dalam demokrasi sama sekali tidak berganti dengan prinsip perundangan Islam. Malah prinsip demokrasi itu berganti dengan 'hukum individualisme' yang menjadi asas kepada timbulnya kediktatoran. Menurutnya, sistem demokrasi adalah menentang kuasa kediktatoran yang menindas rakyat. Perkara terpenting bagi mereka yang memperjuangkan demokrasi ialah mengusahakan agar rakyat memiliki kebebasan penuh untuk memilih para pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka dan agar mereka memperhitungkan tindak-tanduk orang yang memimpinya, menolak perintahnya jika bercanggah dengan falsafah bangsa atau menurunkannya jika terbukti menyeleweng serta enggan menerima nasihat dan teguran rakyat.

Umat Islam secara umumnya telah menerima demokrasi sebagai mekanisme yang terbaik untuk membangunkan negara. Demokrasi meskipun banyak kekurangannya merupakan warisan kemanusiaan yang tidak ternilai



harganya yang sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih unggul untuknya. Sekalipun namanya yang berbeda, akan tetapi biasanya yang muncul secara substansi teori dan prakteknya sama.

D. Kerangka pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari Max Weber tentang agama dan kapitalisme. Dalam teorinya, Weber banyak mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, terutama pada sistem ide-ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Weber memandang gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dunia ekonomi. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and The Spirit of Kapitalism* (1904-05/ 1958), ia memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan itu merintangikan perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-masing. (Goerge Rither. 2003 : 35)

Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat melukiskan cara berfikir Weber dengan satu contoh lain-rasionalisasi institusi ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas tentang

hubungan antara hukum dan kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan luas, weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marxis dalam upaya untuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukanlah sebuah epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah (Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia yang ia kaji, Weber menemukan sistem agama yang lebih irrasional (misalnya, Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional. Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu memberikan rintangan sementara, karena sistem ekonomi- dan bahkan seluruh struktur sosial – masyarakat pada akhirnya akan menjadi rasional. (ibit :40)

Berikut akan dikemukakan konsep Islam dan Konsep demokrasi yang digunakan penulis :

1. Konsep Demokrasi

Kriteria psikologi demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh William Ebenstein ada delapan yaitu (1) empirisme rasional, (2) penekanan pada individu, (3) negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (voluntarism), (5) hukum di atas hukum, (6) penekanan pada cara, (7) persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, dan (8) persamaan semua manusia. Dari delapan nilai itu akan dianalisis nilai yang sejalan dengan Islam dan nilai yang bertentangan dengan Islam. Nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam akan dianalisis implementasinya dalam ICMI

Robert Dahl dalam Suyatno (2004:35) : "Demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif, 2) setara dalam hak suara, 3) mencapai pemahaman yang baik, 4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda, dan 5) melibatkan orang dewasa. Insitusi-institusi politik penting untuk mencapai tujuan-tujuan; 1) pejabat terpilih, 2) pemilu yang bebas, adil dan rutin, 3) kebebasan berpendapat, 4) adanya sumber informasi alternatif, 5) otonomi asosiasional, dan 6) kewarganegaraan yang inklusif

Henry B. Mayo dalam Maswadi Rauf (1997) mencatat ada paling tidak Sembilan nilai yang mendasari demokrasi yakni: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara sukarela, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang

sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (5) adanya keanekaragaman, (6) tercapainya keadilan, (7) yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan, (8) kebebasan, dan (9) adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Menurut Amir Santoso ada empat prasyarat demokrasi, yakni: (1) *equality* (persamaan), (2) *rule of game*, (3) bertoleransi terhadap perbedaan, dan (4) kelas menengah yang kuat. Penulis lainnya menganggap bahwa ada enam ciri penting dari sebuah rezim demokrasi: (1) hak suara yang luas, (2) pemilihan umum yang bebas dan terbuka, (3) kebebasan berbicara dan berkumpul, (4) *rule of law*, (5) pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan (6) badan pengadilan yang bebas.

2. Konsep Islam

Menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: *syura*, musyawarah, amanah, *masulliyah* dan *hurriyah*.

Pertama, *syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 dalam praktik kehidupan

umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin.

Kedua, *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Artinya pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. As-syura:15; al-Maidah:8; An-nisa':58.

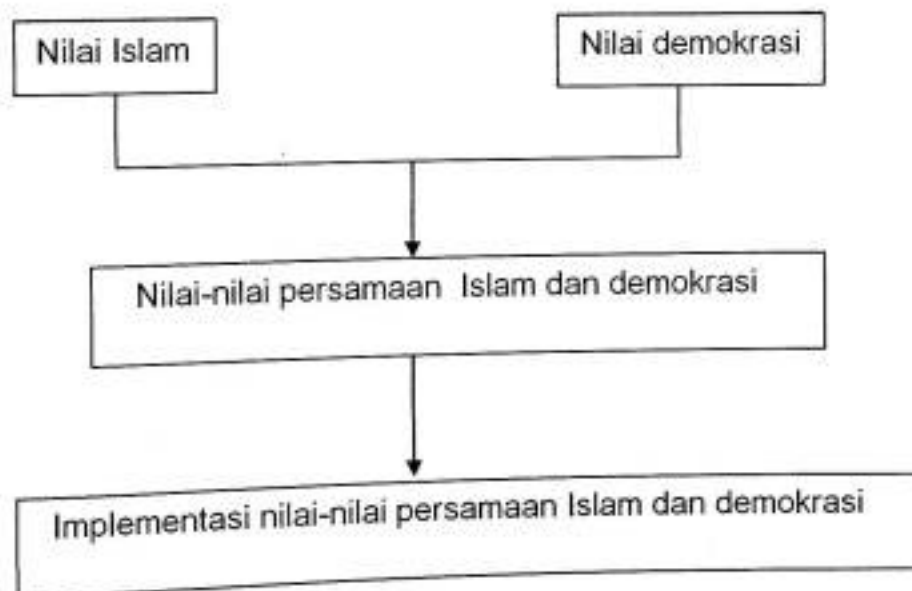
Ketiga, *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Keempat adalah *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dengan konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa':58.

Kelima, *al-Masuliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus

diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.

Keenam, *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-Akhlak al-Karimah dan dalam rangka al-amr bi-'I-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya.

E. Skema Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan penelitian yang dioperasionalkan melalui sebagai berikut :

1. Nilai-nilai yang sama dalam Islam dan demokrasi adalah sesuatu yang memiliki kemiripan atau gagasan yang sejalan. Hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator yaitu
 - a. Persamaan dalam perlakuan
 - b. Persamaan dalam memperoleh kesempatan
2. Peran adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan seseorang berdasarkan fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga indikator :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Dewan Pakar

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan diuraikan 5 aspek. Pertama, lokasi penelitian, kedua, tipe dan dasar penelitian, ketiga, jenis data, keempat, teknik pengumpulan data, kelima, teknik dan analisis data. Kelima aspek ini akan diuraikan lebih jelas.

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analitis. Penelitian menggambarkan dan menganalisis masalah nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi serta implementasinya. Penelaahannya dilakukan secara intensif, mendalam dan mendetail dari komprehensif berbagai variabel yang ditelusuri. Studi kasus dilakukan terhadap individu dan juga terhadap organisasi. Dengan mengkaji Islam dan demokrasi sebagai permasalahannya.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. Pendekatan seperti itu ditujukan pada beberapa individu atau kelompok dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada obyek penelitian.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer dimaksudkan untuk

menggambarkan dan menganalisis implementasi nilai persamaan Islam dan demokrasi pada organisasi ICMI.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. Data sekunder dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis mewawancarai informan yang menjadi sumber data secara langsung dan mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara hanya mempekerja wawasan penulis akan informasi tentang ICMI.

b. Studi Pustaka

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berdasarkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Dengan membaca sumber-sumber literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Di samping itu penulis juga mengumpulkan dokumen-

dokumen mengenai Islam dan demokrasi berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, surat-kabar, opini, dan informasi tertulis lainnya.

D. Teknik dan Analisa Data

Untuk menjawab masalah pertama dilakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, majalah, jurnal, artikel dokuman, opini dan informasi tertulis lainnya. Telaah dilakukan untuk menemukan kategori dan pola-pola nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi.

Masalah kedua berusaha dijawab dengan melihat peran ICMI dalam mengimplimentasikan nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi untuk menganalisis masalah persamaan itu.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan diolah dan dianalisa untuk melihat kecenderungan-kecenderungan tentang penelitian yang dimaksud. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, sesuai dengan masing-masing masalah penelitian yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan tentang nilai persamaan Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG ICMI

A. Histori ICMI

Sejak awal 80-an, di kalangan kaum muslimin Indonesia muncul kegairahan beragama yang sangat tinggi. Gejala ini nampak dari kian marak dan meningkatnya kaum muslimin yang menunaikan ritual-ritual keislaman seperti puasa, haji, shalat berjama'ah dan lain-lain. Ritual-ritual ini tidak saja berlangsung di masjid atau majlis-majlis ta'lim, tapi juga dilakukan di instansi-instansi dan kantor-kantor swasta maupun pemerintahan.

Di kalangan anak muda kampus, kegairahan ini diisi dengan kajian-kajian dan diskusi-diskusi intensif terhadap ajaran Islam dari perspektif multidisipliner. Dikalangan kelas menengah, kegairahan mencuat dalam berbagai kegiatan sosial dan ritual keagamaan yang mereka gelar. Diperlukan beratus-ratus halaman untuk merinci dan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk kegairahan kaum muslimin dalam beragama itu. Namun secara umum gejala ini disebut sebagai bagian dari apa yang diyakini "kebangkitan Islam" yang telah terjadi juga di tingkat global. Masing-masing orang mempunyai visi dan orientasi yang berbeda satu sama lain terhadap makna "kebangkitan Islam" itu.

Dalam suasana yang disebut "kebangkitan" itulah, lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di akhir tahun 1990. Segera setelah kelahirannya bermunculan banyak reaksi yang menolak maupun yang mendukung. Menarik untuk melihat bahwa salah seorang dari tiga tokoh neo-modernis di bawah, Nurcholish Majid, mendukung pendirian ICMI, tapi dua diantaranya, Dhojan Effendi dan Abdurrahman Wahid menolaknya. Bagi Dhojan dan Gus Dur, organisasi ini potensial untuk mengarah ke "primordialisme", "sektarianisme" dan "eksklusivisme". Pendirian ikatan ini, bagi mereka, merupakan langkah mundur pemupukan kehidupan pluralisme selama ini (Syafi'i Anwar.1992).

Pendirian ICMI, bagaimanapun hasil alamiah dari kebangkitan Islam. ICMI dimaksudkan sebagai medium untuk terus memacu agenda kebangkitan Islam itu. Salah satu agendanya itu adalah meningkatkan tingkat kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat muslim.

ICMI merupakan kelompok yang dibentuk dari cendekiawan kelas menengah dan kemudian banyak yang mengisi pos-pos demokrasi. Isu yang berkembang pada saat itu diistilahkan ijo royo-royo yang artinya adalah proses pengislaman dalam organisasi tersebut. karena kedekatan ICMI dengan santri-santri yang taat beribadah. Beberapa tokoh yang dekat dengan ICMI pada saat itu seperti; Panglima TNI Faisal Tanjung, Ahmad Tirta Sudiryo dan kalangan pengusaha. Islam kelas menengah adalah Islam yang

memang menginginkan adanya proses demokratisasi terjadi di Indonesia.
(wawancara Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si)

ICMI muncul sebagai salah satu protagonis paling berpengaruh di awal 90-an yang menyuarakan keharusan keterwakilan umat Islam secara proporsional dalam struktur politik, sosial dan ekonomi Orde Baru itu. Dan setidaknya sejak awal 90-an pula, tuntutan akan politik representasi itu membuahkan, ini jika memakai kalkulasi statistik seperti jumlah menteri, anggota kabinet, dirjen departemen dan lain-lain. Dalam kosakata politik yang populer sekarang, program di atas populer sebagai "politik representasi" (Ulil Abshar Abdalla, 1995).

Sejak didirikan 15 (lima belas) tahun yang lalu, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang cukup banyak dibicarakan – *dipuji, diharapkan, dikritik*, bahkan "*dituduh*" dengan bermacam-macam latar belakang kasus masalah, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan internasional. Baik pengurus atau aktivis ICMI, kesemuanya itu sama harganya. *Pujian* telah meneguhkan keyakinan bahwa langkah yang ditempuh selama ini ternyata benar, *harapan* umat adalah pertanda organisasi ini telah mendapat tempat di hati umat dan bangsa, *kritik* memberikan kesadaran tentang relativitas manusia, bahwa ICMI harus terus berbenah dan menata diri, sedangkan *tuduhan* bagi ICMI dapat dijadikan cambuk untuk makin berhati-hati dalam melangkah, agar tidak salah mengerti terhadap langkah-langkah perjuangan ICMI.

Sebagai kelompok masyarakat yang telah ditakdirkan Tuhan Yang Maha Pencipta, lahir dan hidup di tanah air Indonesia yang beragam suku, tradisi, dan agama., ICMI menyadari kehadirannya sebagai bagian yang Tak terpisahkan dari keseluruhan membina satu negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 45). Kesadaran itulah yang membuat ICMI berkeyakinan bahwa demi kesatuan bangsa, maka **ICMI akan terus berjuang mempertahankan kokohnya persatuan bangsa berdasarkan falsafah kenegaraan yang telah disepakati, yaitu Pancasila dan UUD 1945.**

Untuk dalam pengabdianya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), berjalan di atas *tiga sendi* kebersamaan yang selalu beriringan, yaitu (1) *Islam*, sebagai sendi kehidupan sprtual; (2) *Pancasila* dan UU 1945, sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (3) ilmu pengetahuan dan *teknologi*, sebagai sendi kecendikiaan. Sinergi ketiganya diarahkan pada program jangka panjang ICMI yang dikenal dengan program jangka ICMI yang dikenal dengan program **tunggal 5 K ICMI**, yaitu peningkatan : (1) *kualitas Iman dan Taqwa*; (2) *kualitas pikir*, (3) *kualitas kerja*; (4) *kualitas karya*; dan (5) *kualitas Hidup*.

B. Badan-badan Otonom

Beberapa badan otonom yang dibawah oleh ICMI sebagai pelaksana langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat :

1. Yayasan Dana Madani
2. Yayasan Amal Abadi Beasiswa-Orang Tua Bimbing Terpadu (YAAB-ORBIT)
3. Forum Cendekia Muslimah Peduli (FCMP)
4. Pusat Koperasi dan Bisnis Usaha Kecil
5. Alisa Khadijah (Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia)
6. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIReM)
7. Center for Information and Development Studies (CIDES)
8. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA-ICMI)
9. Kegiatan Franchise Sistem Pendidikan Islam Unggul Insan Cendekia-ICMI
10. ICMI Peduli Aceh

C. Visi dan Misi

Dalam menghadapi berbagai tantangan internal keorganisasian dan eksternal kebangsaan tersebut, ICMI mengembangkan visi yaitu "***Menjadi organisasi cendekiawan yang memberikan kekuatan imtaq dan iptek umat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera***".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ICMI mengembangkan misi :

- (1) Mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui pembinaan akhlakul karimah,
- (2) Mampu meningkatkan kualitas fikir melalui peningkatan kualitas system proses pendidikan,



- (3) Mampu meningkatkan kualitas karya dan kerja melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pelatihan,
- (4) Mampu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan kegiatan sosial dan ekonomi umat, serta karya dan kinerja litbang yang berkualitas.
- (5) Mampu meningkatkan kualitas keluarga dan keturunan melalui pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. Fokus Program ICMI

Agar visi dan misi program ICMI dapat diaplikasikan secara nyata, maka ditentukan focus-fokus program berdasarkan isu yang mendesak (*current issue*) serta terkait dengan peluang dan kebutuhan riil masyarakat yang dikenal dengan Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan, Informasi dan Jaringan serta Kelembagaan dan Kaderisasi, program-program tersebut meliputi :

a. Pemberdayaan Ekonomi

Keterpurukan ekonomi yang saat ini dialami masyarakat Indonesia mestilah dibangun kembali dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber daya yang tersedia dan bisa dimobilisir. Pemberdayaan ekonomi mikro dengan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah merupakan pilihan yang harus dijalankan.

Perubahan paradigma pembangunan yang semula menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi dengan sistem

kebijaksanaan dan pengelolaan yang sentralistis menjadi lebih memandang eksistensi dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangunan dengan system kebijaksanaan dan pengelolaan yang lebih desentralistis merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan.

b. Pemberdayaan Pendidikan

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi materi (substansi pendidikan). Oleh karenanya, untuk mencapai visi dan misi ICMI, pemberdayaan pendidikan merupakan kunci yang harus dilakukan .

c. Pemberdayaan Informasi dan Jaringan

Informasi dan jaringan informasi tidak saja merupakan realitas yang harus diterima sebagai akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi (IT) melainkan merupakan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa depan.

Era digital dan dunia tanpa serat kabel (wireless) mau tidak mau harus menjadi salah satu sarana yang dikuasai oleh masyarakat bila ingin bersaing, bahkan hanya untuk sekedar bisa survive. Oleh sebab itu penguatan dan penguasaan informasi dan perluasan jaringan informasi melalui berbagai media dan institusi harus terus dikembangkan di masyarakat, misalnya dengan perluasan jaringan internet, media cetak, media elektronik bahkan perluasan jaringan kelembagaan. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat

untuk mampu memanfaatkan bahkan menguasai informasi harus menjadi fokus perhatian.

Dalam kegiatan pemberdaan ini ICMI antara lain bisa memberikan fasilitasi dengan mengembangkan data base- (basis data) yang relevan bagi kegiatan pengembangan, antara lain :*Pertama*, data tentang peta keunggulan (potensi) wilayah ; *Kedua*, Data potensi sumber daya manusia; *Ketiga*, Data tentang peluang dan potensi usaha.

d. Pemberdayaan Kelembagaan dan Kaderisasi

Agar focus program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan informasi bisa berjalan dengan baik, maka perlu didukung oleh kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tubuh ICMI sendiri. Oleh karena itu ICMI perlu terus mengembangkan dan memperluas jaringan kelembagaan seraya memberikan peningkatan kualitas SDM, terutama yang ada di badan otonom dan Orsat yang menjadi ujung tombak ICMI, khususnya dalam rangka mengantisipasi otonomi daerah.

Persiapan SDM ini dapat ditempuh dengan melakukan database keahlian melalui pengembangan electronic member cards, serta pelatihan-pelatihan. Oleh karenanya ICMI dan Batom-batom perlu membuat modul-modul pengkaderan yang metodologis, relevan dan unggul.

E. Strategi ICMI

Program yang direncana dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi pendekatan sebagai berikut :

1. Fungsionalisasi dan Fasilitas

Program tidak menduplikasi program kerja dari lembaga-lembaga lain yang sudah ada. Program yang dijalankan hanya memperkaya wahana pengabdian untuk mendorong pendayagunaan potensi kelembagaan umat Islam yang sudah ada, sehingga program bersifat khas yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang diarahkan juga untuk memperkuat potensi mitra kerja. Dengan demikian ICMI hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan lembaga yang ada tersebut dapat menjalankan tujuan lembaganya secara efektif dan produktif.

2. Institusionalisasi

Program kerja ICMI bersifat khas, yaitu memperkuat kelembagaan yang telah ada dengan memperkenalkan gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat Indonesia. Program kerja diarahkan sebagai rintisan dan dikembangkan melalui lembaga yang rasional dan professional. Institusionalisasi dilaksanakan bila, baik di dalam maupun di luar ICMI memang belum tersedia secara professional.

3. Desiminasi

Program kerja dapat berfungsi sebagai desiminasi atau perluasan dan pemerataan informasi mengenai gagasan-gagasan baru yang bersifat inovatif, rintisan, model-model dan kasus-kasus sukses dalam rangka peningkatan 5-K di kalangan umat dan masyarakat.

4. Integrasi dan Jaringan

Program kerja berfungsi sebagai sarana integrasi dan perekatan umat dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian semua program haruslah memberikan sumbangan ke arah proses perekatan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Mobilisasi

Program ICMI harus memberikan manfaat bagi kebutuhan dan usaha melakukan penghimpunan potensi umat dan masyarakat, sehingga dapat diarahkan untuk mendukung upaya optimalisasi pendayagunaan sumberdaya bagi pencapaian 5-K. Asset dan kesempatan yang belum tergali haruslah dikembangkan menjadi potenis nyata yang membawa perubahan social yang dikehendaki masyarakat.

F. Prinsip ICMI

Fokus program ICMI dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Terpadu dan Menyeluruh (Holistik-Integral)

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program harus dilakukan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh dan harus dihindarkan pendekatan secara sektoral dengan tetap mengacu pada peningkatan peran serta masyarakat. Program ICMI dikembangkan untuk menjawab masalah bangsa dengan bertumpu pada mutu pembangunan Indonesia secara menyeluruh, sedangkan mekanisme internal dalam tubuh ICMI dan hubungan kemitraan dengan pihak luar diarahkan untuk mewujudkan tujuan ICMI.

b. Inklusivitas

Mengingat ICMI merupakan bangsa yang tak terpisahkan, maka program ICMI adalah bagian dari program ICMI adalah peran aktif dalam pembangunan nasional, baik pada tahap perencanaan (masukan untuk UU, APBN dan Peraturan Pemerintah Lainnya), tahap pelaksanaan, monitoring maupun dalam tahap evaluasi pelaksanaan pembangunan; termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia.

c. Kecendikiaan

Program kerja ICMI perlu dikembangkan atas dasar sifat kecendekiaan, yaitu keimanan dan ketaqwaan, kepekaan dan profesionalisme. Disamping itu, program kerja ICMI perlu memanfaatkan iptek dan seni seoptimal mungkin. Kecendekiaan juga terwujud pada pengutaman partisipasi, efisiensi dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ICMI. Dalam pemanfaatan iptek, secara implicit di dalamnya terkandung aplikasi prinsip-prinsip iptek berupa keterbukaan, konsistensi, berkembang dan kesetaraan (tidak hirarkis).

d. Pengutamaan Pada Proses

Kaidah proses menjamin kesinambungan program dengan tetap memberi peluang pada peningkatan dan pembaharuan dalam mencapai tujuan, seraf pelibatan masyarakat secara aktif. Proses dan pengendalian ini didukung terutama oleh pemanfaatan metode dan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses pencapaian sasaran

e. Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas dan Mutu Masyarakat

Program kerja ICMI perlu memaksimalkan produktivitas dan mutu masyarakat dari sumber terbatas baik modal maupun fasilitas, sarana dan prasana fisik maupun non fisik, sumber daya manusia dan waktu. Untuk itu diwujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber-sumber terbatas makro dan mikro ICMI, sehingga in-efisiensi dapat dihindari.

f. Pemerataan dan Partisipasi

Masyarakat harus dipandang sebagai mitra yang memiliki potensi yang perlu difasilitasi agar mampu berkembang secara merata. ICMI dapat berperan sebagai katalisator untuk memperluas kesempatan dan akses informasi bagi mitra kerja, sehingga mereka mampu mendayagunakan potensi internalnya secara efektif. Setiap program dikembangkan sebagai gagasan yang tumbuh dan dilaksanakan secara partisipatif oleh kekuatan mitra kerja. Dengan demikian ICMI tidak tumbuh sebagai outsider yang asing dengan menawarkan program yang sama sekali tidak kontekstual dengan kebutuhan dan potensi masyarakat atau lembaga yang menjadi mitra

g. Kestinambungan dan Peningkatan (Pengembangan)

Pada hakekatnya program yang dilaksanakan merupakan proses pencapaian tujuan. Dengan demikian program yang dilaksanakan pada setiap periode mesti merupakan kestinambungan dari program sebelumnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan hasil yang telah diraih sehingga tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Peran dan fungsi dari Ketua Umum, Sekretaris dan Dewan Pakar,

yaitu :

1) Ketua umum

- a. Ketua Umum adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi.

- b. Ketua Umum memegang masa jabatannya 5 (lima) tahun.
- c. Ketua Umum memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- d. Dalam hal Ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua Umum melalui sidang Majelis Pimpinan Paripurna, untuk memimpin organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya.
- e. *Dalam hal Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih Ketua Umum definitif melalui sidang Majelis Pimpinan Paripurna yang diagendakan khusus untuk keperluan itu dan di kukuhkan dalam forum nasional untuk masa kepemimpinan organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya.*

Tugas dan Kewajiban Ketua umum :

- a. *Menyiapkan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, hasil-hasil Musyawarah Pusat serta ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.*
- b. Segera mengumumkan/menyampaikan kepada aparat ICMI segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ICMI.
- c. Ketua umum bertanggung jawab kepada Muktamar.
- d. Ketua umum bertanggung jawab keluar dan kedalam organisasi.

- e. Ketua umum, baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan.
- f. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengurus baru terbentuk, Ketua umum demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
- g. *Ketua Umum tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik.*

2) Sekretaris

- a. Sekretaris adalah yang menyiapkan segala sesuatu untuk pertemuan.
- b. Sekretaris memegang masa jabatannya 5 (lima) tahun.
- c. Sekretaris memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- d. Dalam hal sekretaris tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih sekretaris melalui sidang Majelis Pimpinan Paripurna, untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya.
- e. *Dalam hal sekretaris mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih sekretaris definitif melalui sidang Majelis Pimpinan Paripurna yang diagendakan khusus untuk keperluan itu dan di kukuhkan dalam forum nasional untuk masa kepemimpinan organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya.*

Tugas dan Kewajiban Majelis Pengurus Pusat :

- a. *Membantu Ketua umum menyiapkan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, hasil-hasil Musyawarah Pusat serta ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.*
- b. Sekretaris, baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan.
- c. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengurus baru terbentuk, Sekretaris demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

3). Dewan Pakar

- 1) Dewan Pakar beranggotakan para tokoh cendekiawan muslim yang mempunyai kelebihan dibidang pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan serta disegani dan dihormati dikalangan ummat dan sesama cendekiawan muslim.
- 2) Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan akan dijelaskan nilai persamaan Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI. Pada skripsi ini penulis lebih menekankan mengenai persamaan Nilai Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI. Serta peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari max Weber tentang agama dan kapitalisme. Dalam teorinya, Weber banyak mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, terutama pada sistem ide-ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Weber memandang gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dunia ekonomi. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and The Spirit of Kapitalism* (1904-05/ 1958), ia memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan itu merintangi perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-masing. (Goerge Rither. 2003 : 35)

Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat melukiskan cara berfikir Weber dengan satu contoh lain-rasionalisasi institusi yang terlibat karena ajaran agama dan ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas tentang hubungan antara hukum dan kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan luas, weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marxis dalam upaya untuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukanlah sebuah epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah (Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia yang ia kaji, Weber menemukan sistem agama yang lebih irrasional (misalnya, Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme) merintang perkembangan sistem ekonomi rasional. Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu memberikan rintangan sementara, karena sistem ekonomi- dan bahkan seluruh struktur sosial – masyarakat pada akhirnya akan menjadi rasional. (ibit :40)

Berdasarkan teori tersebut, penulis memberikan analisis tentang tumbuhnya semangat kapitalisme dikalangan umat kristen protestan di Barat, dikarenakan adanya keyakinan dikalangan para pembesar agama kristen tersebut, Dimana lebih menekankan bahwa ide-ide kapitalisme sangat berhubungan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka.

Hal tentang agama dan kapitalisme juga terdapat dalam ajaran Islam. Dalam Hadist sahih yang artinya tuntutlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok . Juga terdapat dalam surah Al Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya (9) hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (10) apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Contoh empirik yang dapat kita lihat yaitu riwayat hidup nabi Muhammad SAW sebagai menerima dan menyampaikan wahyu bagi seluruh umat manusia juga adalah seorang manusia yang wajib memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan beliau dan sahabat-sahabatnya menjadi pedagang.

Dizaman modern seperti sekarang ini ideologi kapitalisme dalam Islam dapat kita lihat ketika seorang ustaz berdakwah di mesjid atau tempat-tempat lainnya, membutuhkan imbalan berupa materi untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam demokrasi, kapitalisme dan demokrasi itu sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Perdebatan tentang demokrasi dan pembangunan mengemuka sejak negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara berhasil membangun negerinya dari kehancuran Perang Dunia II. Demokrasi dianggap memiliki hubungan resiprokal dengan pembangunan yang sukses diterapkan diwilayah tersebut. Semour Martin Lipset mengkonseptualisasikan fenomena tersebut ke dalam teorisasi hubungan modernisasi dan demokrasi yang terkenal. Barrington Moore Jr, dengan karyanya menyuarakan pentingnya kelas borjuasi sebagai pilar utama demokrasi. *"tidak ada borjuis berarti tidak ada demokrasi"*.

Hasil positif pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara oleh Lummis berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih pesat jika dilaksanakan di bawah alam demokrasi. Keyakinan ini bermuara pada kenyataan bahwa negara-negara yang relatif makmur sekarang ini adalah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. (Suyatno 2004 :31-32)

Berdasarkan teori tersebut, menurut hemat penulis bahwa demokrasi itu hanya dapat tumbuh di masyarakat yang tingkat ekonominya sudah

mapan. Karena ketika masyarakat masih berada dalam ruang kemiskinan maka kestabilan demokrasi tidak akan pernah terwujud, disebabkan masyarakat hanya memikirkan masalah pemenuhan kebutuhan pribadi.

Berikut akan di bahas mengenai persamaan nilai Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI serta peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan.

A. Nilai persamaan Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI

Dengan bertitik tolak pada karya Weber yaitu "The protestant Ethic and The spirit Of Kapitalism" pemikirannya memfokuskan pada sistem agama rasionallah yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme. Secara rasional agama itu menjadi spirit dari sebuah sistem kapitalisme. Ada persamaan dalam memaknai agama dan kapitalisme itu.

Nilai persamaannya adalah adanya orang dalam memperoleh perlakuan dan dalam memperoleh kesempatan serta hidup yang layak, baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup berupa materi dan non materi.

Dilihat dari perspektif tersebut tersirat bahwa Weber juga mencetuskan ide demokrasi melalui pemikirannya di atas. Terkait dengan dasar teori ini penulis mencoba meletakkannya sebagai alat analisis dalam memahami nilai persamaan agama dan demokrasi dalam tubuh ICMI.

Nilai persamaan dalam hal ini persamaan perlakuan dan persamaan memperoleh kesempatan dalam perspektif ICMI, tidak lepas dari pemahaman tentang Islam dan demokrasi itu sendiri. Termasuk juga kemampuan ICMI

terkait aset-aset ekonomi. Karena bukan kebetulan orang-orang yang terlibat dalam ICMI itu adalah kelas menengah, terdidik dan secara finansial adalah orang-orang yang dikategorikan mampu.

ICMI sangat mendukung demokrasi. Salah satu syarat tumbuhnya demokrasi adalah jangan saling mengganggu dan merusak sistem yang sudah ada. Demokrasi harus dengan dasar saling menghargai satu sama lain. Demokrasi ditujukan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat.

Di samping itu demokrasi membutuhkan etika kebebasan individual. Warga negara harus memperoleh jaminan kebebasan hukum mengemukakan pendapat dan fikirannya. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. (An'aam : 132). Tetapi kebebasan harus tunduk kepada peraturan atau hukum yang disepakati bersama serta tunduk pada norma budaya masyarakat dimana sistem demokrasi tersebut diberlakukan. kebebasan tanpa batas justru akan mengancam kelangsungan demokrasi, karena akan berubah menjadi anarki seperti yang kita saksikan dewasa ini baik di pusat maupun di daerah. (313.silaknas ICMI, Pekanbaru-Riau, 11-13 Januari 2008).

ICMI sebagai kelompok yang paling sadar dan intelektual bagaimana bertindak tidak hanya memperkuat demokrasi di dalam Indonesia tetapi bagaimana membangun model demokrasi di dunia. Menurut penulis inilah

panggilan sejarah buat kita. Selama ini kita masih sibuk dengan lembaga-lembaga kenegaraan. Revolusi dunia itu ada tiga; pertama, revolusi yang dibawa para nabi, kedua, revolusi politik dan kenegaraan dan ketiga, revolusi informatika, ketiga-tiganya kita belum bisa menyatukannya, masih berada pada ruang eksklusif masing-masing. Tidak jadi satu sinergi.

Kearifan dalam berfikir dan berkonsep, disitulah sebenarnya kekayaan ICMI sehingga tidak dapat dipaksakan bahwa tidak mungkin tidak ada konflik. Karena justru konflik itu tidak ada dalam berorganisasi. Inilah keunggulan dari cara berorganisasinya karena selalu menciptakan konsensus dalam interaksi antar anggotanya.

Islam dan demokrasi bisa sejalan dan bisa tidak sejalan. Tapi yang ingin dicari bagaimana bisa sejalan. Diharapkan orang yang berkumpul yang semula heterogen menjadi homogen. Homogen dalam melihat kebangsaan. Kita berkumpul, berpartai, berorganisasi, sebenarnya untuk apa, kalau hal itu tidak jelas, hal itu akan sangat merepotkan karena semua akan berfikir parsial-parsial. Dalam ICMI konsep itulah yang dipakai, namun ketika di luar, dapat memakai 'baju' masing-masing

Kebersamaan itu kuat dari perbedaan. Tapi bukan berarti perbedaan itu melahirkan konflik. Demokrasi itu dipahami sebagai konsep yang alamiah dalam berkebangsaan. Semua yang dilakukan bermuara pada rakyat. Jika tujuannya mengabaikan kepentingan rakyat, berarti keluar dari konsep demokrasi.

Dalam pengimplementasian nilai-nilai persamaan, secara eksklusif ICMI sedang berproses dan sedang menuju ke arah sana. Sesuai dengan konsep madani dipopulerkan ICMI, bahwa kaum minoritas tidak diintimidasi. Misalnya, orang non-non Islam, jika dimasukkan dalam konsep madani, mereka tetap aman. Itulah konsep persamaan yang dipopulerkan oleh ICMI. Hal ini masih terus diupayakan oleh ICMI meskipun belum optimal

Dilain pihak Weber juga menganalisis secara rinci tentang rasionalitas di dalam masyarakat itu. Dimana agama juga berusaha menciptakan masyarakat yang dapat berfikir secara rasional. Artinya, bahwa masyarakat dibentuk karena adanya perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak dipertajam apalagi kalau didasari atas sebuah keyakinan atau agama. Terkait dengan pemikiran ini, penulis menganggap apa yang dipikirkannya sesuai dengan konsep masyarakat madani yang dicita-citakan oleh ICMI.

Masyarakat madani yang dicita-citakan oleh ICMI adalah masyarakat yang tidak melihat perbedaan dari segi agama dan urusan-urusan yang sifatnya ubudiah (ibadah). ICMI adalah organisasi yang professional yang tetap memisahkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Hal ini pula yang dikemukakan oleh William Ebeinsten dalam kriteria psikologi demokrasi (persamaan semua manusia). Dimana semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras. Warga negara juga memiliki jaminan hukum akan kebebasan

berpendapat dan mengemukakan pikiran. Nilai-nilai Persamaan ini juga merupakan hal yang dicita-citakan oleh ICMI dalam masyarakat madani, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Dalam pandangan ICMI Islam adalah agama yang merupakan "rahmatan lilalamin". Dalam memahami rahmatan lilalamin itulah diperlukan proses persatuan umat Islam yang berserak-serakan karena begitu banyaknya aliran-aliran dan organisasi-organisasi keumatan. ICMI dibentuk untuk menghimpun kekuatan berdasarkan keislaman, kecendikiaan dan kebangsaan. Artinya ICMI bukan organisasi yang lahir sebagai perwujudan baru dari organisasi-organisasi Islam sebelumnya. Itulah sebabnya ICMI tidak segan-segan menampilkan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum pertama karena dua alasan. Pertama, B.J. Habibie adalah teknokrat dan cendikiawan yang tidak memiliki sejarah organisasi dengan organisasi Islam manapun, kecuali karena dikenal sebagai muslim yang konsisten dalam ibadahnya. Kedua, karena B.J. Habibie adalah sosok birokrat intelektual yang dianggap dekat dengan rezim Suharto yang tentunya bisa menjadi jaminan eksistensi ICMI yang baru terbentuk.

Nilai-nilai persamaan, keadilan, musyawarah mufakat dan toleransi terhadap sesama dalam Islam telah ada dalam Al-Quran dalam An' aam ayat 132 yang artinya dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. dan surat Al Ashr yang artinya (1) demi masa, (2)

sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran, dan surat Az Zalzalah ayat 6-8 yang artinya : (6) pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, (7) barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, (8) dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebersar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Sedangkan dari segi konteks demokrasi nilai-nilai ini juga adalah perwujudan dalam proses demokratisasi yang telah diaplikasikan oleh manusia. Dalam demokrasi semua warga Negara mempunyai perlakuan serta memperoleh kesempatan yang sama. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 yang berbunyi : kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga



Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Akhirnya bagian ini penulis memahami bahwa nilai persamaan perlakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan baik dalam Islam dan demokrasi dalam perspektif ICMI, dapat merujuk dari teori Weber yang berintikan pada nilai (1) sistem agama rasionallah yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di barat , (2) agama mendukung terciptanya masyarakat yang berfikir rasional.

.B. Peran ICMI Dalam Implementasi Nilai Persamaan.

Dengan berdasar pada pemikiran Weber yang mencoba menfokuskan pada peran institusi karena agama di dalam masyarakat, weber memahami institusi karena agama tersebut lebih mudah berkembang dalam masyarakat Barat. Hal ini kemudian oleh penulis diadopsi untuk melihat bagaimana perkembangan institusi ICMI dalam melihat masyarakat terutama pada makna persamaan perlakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan.

Walaupun ICMI semakin berkembang, akan tetapi ICMI tetap merujuk pada sariat-sariat Islam. Selain itu pula ICMI juga masih tetap menggunakan pemikiran sejarah-sejarah Islam yang terkait dengan demokrasi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, ICMI terdiri dari orang-orang yang dianggap telah memahami

Islam dan demokrasi dan secara ekonomi itu telah dianggap mapan. Sekaitan dengan itu semua, maka persoalan ICMI sekarang adalah bagaimana gagasan nilai persamaan perlakuan dan persamaan memperoleh kesempatan itu di implementasikan dalam organisasi itu sendiri, masyarakat, dan negara.

Pengalaman empirik "demokrasi" hanya bisa ditemukan pada masa pemerintahan Rasulullah sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan zaman Khulafa al-Rasyidin. Setelah pemerintahan keempat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit kita menemukan "demokrasi" di dunia Islam secara empirik sampai sekarang.

Namun patut nilai-nilai demokrasi telah dipraktekkan secara baik oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz di dalam pengelolaan negara di tahun 817-820. Umar menolak penunjukan dirinya sebagai Khalifah yang didasarkan atas garis keturunan. Ia beranggapan bahwa Khalifah harus dipilih oleh masyarakat melalui kesepakatan para ulama yang mewakilinya, ia baru bersedia menjadi Khalifah setelah mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz tercatat sebagai salah satu pemerintahan terbaik dalam sejarah Islam, dengan mampu mewujudkan "kesejahteraan dan keadilan" bagi semua golongan.

Apabila terdapat "penolakan" terhadap demokrasi dalam Islam biasanya bersumber dari pandangan bahwa dalam sebuah negara Islam, Tuhan adalah sumber hukum. Tuhan adalah pemberi hukum dan Tuhan bersifat sovereign, dan hal tersebut sumber mutlak dari hukum yang juga mutlak, sehingga dalam pembahasanan ini, bagaimana mungkin pandangan Islam yang semacam ini mesti dipertemukan dengan gagasan demokrasi yang menekankan pada aspek suara mayoritas. Terhadap pandangan ini, Muqtader Khan menjelaskan bahwa, cara pandang yang salah terhadap demokrasi maupun kedaulatan Tuhan yang inilah pada prakteknya justru dijadikan sebagai slogan bagi para Islamis yang menentang demokrasi. Padahal, demokrasi mengandung banyak hal, dan bukan hanya persoalan suara atau votes dan aturan mayoritas. Demokrasi konstitusional justru memiliki sejumlah jaminan yang akan melindungi hak-hak individu dari tirani mayoritas.

Penolakan demokrasi dengan dalih bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan hukum; dan bahwa jika demokrasi diberlakukan hukum manusia sama dengan mengambil alih peran Tuhan yang sebenarnya juga bersumber dari cara pandang yang sempit terhadap teks-teks Al-Qur'an. Benar bahwa Tuhan adalah pemberi hukum yang mutlak, tetapi Tuhan telah mendelegasikan tugas itu kepada manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai pencipta hukum di bumi (Q.S. 2:30). Dalam kondisi semacam inilah, Al-Turabi memperingatkan pentingnya umat Islam

untuk bisa membedakan kedaulatan secara *de jure* dan kedaulatan secara *de facto*. Secara *de facto*, maka manusia adalah pemegang kedaulatan hukum dalam negara dengan sistem apapun.

Sebaliknya kedaulatan menjelma dalam konteks *de facto*, yang terjadi adalah adanya sekelompok kecil kaum muslim yang merasa memiliki kewenangan untuk berbicara atas nama Tuhan. Padahal dalam sebuah negara Islam yang demokratis, setiap manusia adalah Khalifah di muka bumi dan karena itu berhak bertindak atas nama Khalifah sepanjang tindakannya itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan yang telah didelegasikan pada manusia.

Maka pada saat bersamaan, secara filosofis demokrasi sebenarnya memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada manusia dan memberikan tempat yang mutlak kepada Tuhan. Dengan menempatkan Tuhan sebagai pemilik kewenangan *de jure*, sama artinya dengan mengagungkan Tuhan pada posisi yang sangat tinggi. Justru nilai mutlak Tuhan menjadi tereduksi manakala Tuhan harus turun sendiri ke bumi untuk mengatur sendiri persoalan-persoalan yang bisa didelegasikan kepada manusia. Sehingga adopsi praktik demokrasi tidak harus selalu dianggap sebagai 'melangkahi' kewenangan Tuhan. Karena sebagaimana yang diyakini oleh al-Maududi, Tuhanlah yang berhak memberikan hukum sebuah negara.

Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan bahwa demokrasi adalah langkah menuju sekularisasi politik Islam menjadi sesuatu yang berlebihan.

Lahirnya pemikir-pemikir muslim yang memiliki *concern* pada demokrasi, di luar perbedaan yang melekat pada masing-masing diri mereka, sebenarnya menekankan pada nilai-nilai universal yang sama, seperti: keadilan, kemuliaan dan kesetaraan manusia, aturan hukum, peran rakyat dalam memilih pemimpin yang menjunjung nilai-nilai pluralisme. Jika dilihat pada nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam sistem demokrasi ini, sebenarnya semua merujuk kepada nilai-nilai Islam. Dengan demikian penilakan demokrasi atas nama Islam, sebenarnya justru mereduksi makna Islam sendiri, dan dengan sendirinya telah menjadikan Islam sebagai tameng untuk melanggengkan otoritarianisme.

ICMI yakin bahwa Islam dan demokrasi bisa sejalan. ICMI menganggap bahwa demokrasi terutama dalam bidang politik dan ekonomi justru harus dibangun lewat proses yang etis, taat azas dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Sejauh ini yang penulis lihat bahwa peran mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan demokrasi sudah menunjukkan kemajuan dalam berorganisasi walaupun tidak mendekati kesempurnaan. Mengingat adanya perbedaan latar belakang ideologi yang mereka miliki. Walaupun dalam ICMI mereka harus melepaskan baju ideologi yang berbeda itu, akan tetapi ego sentral tidak bisa dihapus dari individunya.

Berikut ini disajikan bagaimana implementasi nilai persamaan perlakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan di dalam institusi

(organisasi ICMI) yang cenderung mendekati pemikiran Weber bahwa peran institusi oleh dasar pemikiran rasionalisasi itu juga disebabkan oleh faktor agama .

Daalm hal ini penulis menyajikannya sebagai sebuah realitas yang nyata yang terjadi dalam organisasi ICMI yang menitikberatkan pada Ketua, Sekretaris, dewan pakar.

1. Ketua

Contoh kasus dalam hal memimpin rapat dan dalam pengambilan keputusan. Dalam memimpin rapat, ketua sifatnya hanyalah memfasilitasi. Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi setiap anggota rapat. Pada saat rapat, yang diundang adalah berdasarkan dari bidang dan kapasitasnya.

Dalam hal pengambilan keputusan, ketua senantiasa memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk semua peserta rapat, tanpa melihat latar belakang peserta tersebut.

Penulis melihat, dalam organisasi ICMI ini, ketua umum telah mengimplementasikan nilai persamaan dalam perlakuan dan persamaan memperoleh kesempatan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai peran membantu menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan mengarahkan ketika rapat berlangsung. Dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan nilai persamaan perlakuan dan

persamaan memperoleh kesempatan, dalam peran pengimplementasian sekretaris juga tidak membedakan hak seluruh anggota rapat. Dan tersebut telah sesuai dengan nilai persamaan perlakuan dan persamaan memperoleh kesempatan.

Dalam pengimplementasian hal-hal tersebut, tidak terdapat masalah yang dapat menimbulkan perselisihan antara anggota-anggota rapat. Karena mereka selalu menjunjung nilai Islam dan demokrasi dalam setiap kegiatannya.

3. Dewan Pakar

Dalam organisasi ICMI Dewan Pakar mempunyai fungsi memberikan masukan-masukan berupa pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

Contoh kasus : dalam setiap kali mengadakan rapat, salah satu Dewan Pakar selalu hadir mendampingi ketua untuk mengikuti jalannya rapat dan menengahi ketika rapat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengimplementasikan nilai persamaan, Dewan Pakar senantiasa berupaya mewujudkan konsep masyarakat madani, dengan menjunjung nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi.

Kita tidak bisa menafikkan di dalam tubuh umat Islam sendiri terdapat banyak keragaman tentang hubungan Islam dan politik termasuk di dalamnya dengan demokrasi. Varian-varian pemikiran itu bisa terjadi, karena Islam

memang memberikan ruang pada perbedaan. Kata Nabi Muhammad SAW: "perbedaan diantara umatku adalah rahmat". Dalam rahmat, perbedaan itu, seyogyanya ICMI mempunyai posisi pendapat bahwa demokrasi yang Islami adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai dasar universal tadi, yaitu: keadilan, amanah, tanggung jawab, kebebasan, kemuliaan dan kesetaraan.

Dalam melakukan apapun ICMI selalu berpedoman pada 5K ICMI, yaitu peningkatan : kualitas iman dan taqwa, kualitas fakir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Hal-hal tersebut yang selalu memotivasi ICMI, sebagai gerakan moral yang bisa mempengaruhi kebijakan publik. ICMI juga melakukan kegiatan-kegiatan demokrasi di bidang pendidikan

Memang ada pandangan umum tentang Islam seolah-olah tidak kompatibel dengan demokrasi; terutama karena yang jadi sebagian besar adalah monarki absolut atau di bawah pemerintahan otoriter walaupun ada demokrasi sangat terbatas. Namun, di dalam masyarakat Islam modern, di negara-negara seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, dan Mesir, gerakan-gerakan pro demokrasi sangat kuat. Di Indonesia adalah justru tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam yang berdiri di garis terdepan dalam setiap perjuangan melawan penjajah, melawan kaum anti agama, atau komunis di tahun 1960-an, serta dalam gerakan-gerakan reformasi yang mencapai puncaknya dengan ditegakkannya demokrasi di Indonesia pada akhir dasawarsa 1990-an. Anders Uhlin (1997) menggambarkan dengan jelas *"many Indonesia pro-democracy activist are more than nominally Muslim and*

they often use Islamic discourses to motivate their struggle for democracy. The renewal of Islamic thinking since 1970s has been important".

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat di analisis mengenai makna demokrasi yang sesuai dengan pemahaman penulis.

- Demokrasi bila prasyarat untuk menjalankannya dipenuhi, adalah sistem yang sudah terbukti bertahan selama ratusan tahun.
- Semua sistem lawannya telah tumbang satu-persatu (fasisme, komunisme).
- Demokrasi berpotensi dapat menghasilkan kesejahteraan karena hak-hak politik dan sipil anggota masyarakat yang terlindungi, dan dengan demikian juga kreativitas dan inovasinya.

Apabila demokrasi tidak menghasilkan kemajuan dan perbaikan kesejahteraan, ada dua kemungkinan penyebabnya :

1. Demokrasi yang dijalankan tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
2. Kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan tidak ditujukan untuk menghasilkan perbaikan kesejahteraan. Demokrasi hanyalah sebuah sistem politik , maka untuk menghasilkan kemajuan sosial ekonomi perlu diikuti oleh kebijakan-kebijakan publik yang ditujukan untuk kemajuan sosial, hukum, ekonomi.

Dengan sudut pandang itu kita bisa melihat dimana letak "kesalahan" dari sistem demokrasi yang sedang kita jalankan terutama sistem dan pelaksanaan demokrasi politik itu sendiri.

Berkenaan dengan pelaksanaan demokrasi politik di negara kita, dari pengamatan penulis, pada beberapa anggota ICMI, diperoleh petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- Demokrasi kita tidak berjalan secara demokratis, dalam arti tidak semua anggota masyarakat tidak menikmati hak politik yang sama. Partai-partai politik menguasai seluruh kegiatan politik tanpa menyisakan pada kekuatan demokrasi lainnya, yang sama pentingnya dalam sebuah demokrasi yaitu civil society atau masyarakat madani.
- Salah satu indikatornya untuk menjadi anggota DPR seseorang harus menjadi anggota partai politik. Gubernur, Bupati dan Walikota juga harus berasal dari partai politik. Bahkan Presiden pun hanya boleh dicalonkan oleh partai politik. Akibatnya partai politik berfungsi menjadi makelar politik, dan sebagai akibatnya menyebabkan "mark up" dalam biaya politik; yang menimbulkan gejala mahalannya ongkos politik di Indonesia, yang berarti hanya kaum elit yang menguasai kekayaan dan sumberdaya kekuasaan yang dapat menjalankan peran politik.
- Salah satu bentuk penyimpangan yang paling serius dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini, misalnya dalam penyelenggaraan pilkada, adalah berupa "politik uang" yang telah sedemikian marak hingga mencapai tahap yang tak pernah terbayangkan di masa-masa sebelumnya.
- Politik uang ini telah menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional yang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam

berdemokrasi. Demokrasi yang terbangun dengan cara demikian tak akan mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

- Akibatnya proses politik menjadi buntu, dan aspirasi masyarakat meskipun telah disuarakan oleh pers yang bebas, Tetapi tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Akibatnya pula terjadi paradoks antara apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat dengan apa yang difikirkan dan diputuskan oleh elit politik.
- Proses pengambilan keputusan di dalam partai-partai politik itu sendiri belum mencerminkan proses demokrasi, sehingga yang sekarang terjadi kekuasaan otokrasi digantikan oleh kekuasaan oligarki.
- Belakangan ini diciptakan badan-badan, baik yang ada dalam konstitusi maupun yang diatur dalam undang-undang, yang anggota-anggota harus melalui pertimbangan atau persetujuan DPR (partai politik) mulai dari MA, MK, BPK, KY, Gubernur BI, KPK, KPU, BP Migas, dan berbagai komisi lainnya, sehingga menyebabkan DPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Sebaliknya tidak ada lembaga yang mengawasi DPR dalam menyelenggarakan kekuasaannya itu.
- Pemekaran daerah, sebagai usaha memperkuat otonomi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tidak menghasilkan kesejahteraan tetapi justru merugikan karena dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan, menjadi tersedot untuk membiayai aparat birokrasi termasuk institusi-institusi politik seperti DPRD. Bahkan melalui

desentralisasi dirasakan makin besar ketimpangan antar daerah, terutama daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan kemakmuran dirasakan oleh masyarakat justru hanya memakmurkan para pejabat di daerah dan bukan rakyat; dan membuat daerah yang kaya tambah kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin kalau tidak makin miskin; juga telah terjadi "desentralisasi" korupsi bersamaan dengan otonomi daerah.

- Amandemen konstitusi telah melahirkan berbagai lembaga konstitusi baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem kenegaraan kita. Dalam prakteknya yang terjadi adalah konflik-konflik antar lembaga negara, oleh karena tidak jelasnya peran dan fungsi serta batas-batas kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara.

- Secara khusus telah diciptakan oleh lembaga perwakilan yang baru untuk memperkuat sistem parlemen kita dan mengaktifkan fungsi *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara termasuk antar lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam kenyataannya lembaga perwakilan daerah tersebut tidak diberi kewenangan dan fungsi yang tegas, sehingga membuat sistem menjadi rancu dan tidak memperbaiki okum_litas demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya adalah kehendak orang yang terbanyak, tetapi dengan melindungi yang kecil atau minoritas. Khususnya di

Indonesia, demokrasi harus mencerminkan pluralitas bangsa kita, yang antara lain menjadi tujuan adanya lembaga legislasi kedua tersebut. Namun sistem yang dibangun oleh reformasi dengan biaya yang cukup mahal ini tidak difungsikan dengan baik.

- Kekuasaan kehakiman sebagai payung penegak hukum dan penjamin hak manusia berfungsi dengan baik sehingga belum mendukung kinerja demokrasi yang salah satu prasyarat politiknya adalah *rule of law* dan berjalannya *law enforcement*.

- Demokrasi yang terbentuk sejauh ini, lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sehingga transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum dapat menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan kredibilitas yang sehat menghendaki ke sederajatan hingga taraf tertentu dari basis ekonomi dan sosial. Demokrasi tidak melulu berhubung dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), tetapi juga dengan hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Pertimbangan inilah yang membuat para pemikir demokrasi seperti, Alexis de Tocqueville dan Amy Gutmann, menghubungkan demokrasi dengan keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Bagi de Tocqueville, demokrasi memiliki makna di luar politik, yaitu ke sederajatan kondisi sosial dan ekonomi ditambah dengan semangat egalitarisme dan keinginan merdeka. Dari kesetaraan kondisi ekonomi dan

sosiallah, menurut Tocqueville, ada kecenderungan untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan masyarakat madani yang mandiri. Di negara-negara tempat warganya berdiri, tanpa melihat dan dibedakan berdasarkan silsilah, banyak berdiri perkumpulan yang dibentuk oleh warganya sendiri untuk mengasah kekuasaan mereka. Dari terbentuknya asosiasi-asosiasi inilah timbul rasa dan pemahaman kesetaraan. Perkumpulan ini lalu melindungi dan melestarikan kesetaraan ini dengan mencegah kelompok lain menjadi dominan. Sehingga, perkumpulan ini, bagi Tocqueville, memiliki dua fungsi dalam sistem politik egalitarian: sebagai penjaga demokrasi. Demokrasi tanpa kesederajatan kondisi sosial dan ekonomi adalah demokrasi yang pincang.

Disinilah terlihat bahwa konsolidasi demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada reformasi prosedural, melainkan harus menjangkau hal yang substantif. Demokrasi prosedural, atau poliarki menurut Robeung:1993), lebih menekankan kemerdekaan rakyat memilih pemimpin. Esensinya, poliarki tak lain adalah pemilihan pemimpin dan wakil rakyat dari elite-elite yang merebut kuasa melalui mekanisme pemilu. Demokrasi prosedural memerlukan suatu versi *expanded*, menuju demokrasi substantif yang melibatkan upaya-upaya pencapaian keadilan sosial dan ekonomi. Robert Putnam (1993)mengingatkan tidak ada yang lebih gamblang bahkan dari pengamat kasual mengemukakan bahwa keefektifan demokrasi berhubungan erat dengan modernitas dan keberdayaan sosio-ekonomis.

Dengan demikian, perbaikan prosedur demokrasi harus seiring dengan perhatian terhadap kemajuan dan demokratisasi ekonomi. Adapun usaha demokratisasi ekonomi ini harus bersandar setidaknya pada dua sendi pokok

- Proses ekonomi terinstitusikan tidak boleh berwatak oligarkis. Ini berarti bahwa rakyat harus secara sungguh-sungguh dilibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang bersifat umum dan makro.
- Struktur-struktur ekonomi terinstitusikan yang ada tidak boleh berbentuk atau memiliki relasi kuasa timpang. Dengan kata lain, struktur ekonomi ini harus di demokratisasi seluas mungkin sehingga makin mengecilkan ketimpangan ekonomi yang telah ada supaya pada akhirnya tercapai suatu kesetaraan (bukan kesamaan) ekonomis saat mana tiap-tiap warga negara memiliki kemandirian untuk turun berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

ICMI melihat Islam dan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu diartikan bahwa Islam dan demokrasi seharusnya tidak dipahami dalam pola berfikir linier. Pola berfikir linier ini hanya akan mengarahkan masyarakat kita untuk bergerak dari kesejahteraan ke kesejahteraan tanpa makna. Hal ini sama persis seperti pengalaman negara-negara maju yang bergerak dari pertumbuhan ke pertumbuhan yang digerakkan oleh spirit material values. Model pembangunan ini telah lama dikritik oleh Amartya Sen (penerima Nobel dibidang ekonomi) yang sampai

pada kesimpulan bahwa pembangunan itu harus ditujukan pada pembebasan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan itu seharusnya ditujukan untuk menggunting seluruh hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang dalam mengembangkan potensi dan energi secara optimal sesuai dengan nilai yang diyakininya. Berkaitan dengan hal tersebut, ICMI berpeluang untuk menyempurnakan gagasan Sen itu dengan mengelaborasi frase "sesuai dengan nilai yang diyakininya". Dalam konteks ini, frase tersebut harus diikat dengan nilai kolektif, yang dapat menjamin keutuhan dan sustainabilitas kehidupan bersama berdasarkan prinsip-prinsip Illahiah yaitu kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, tema Islam, demokrasi dan kesejahteraan ini perlu ditambahkan dengan nilai keutuhan dan sustainabilitas bagi kehidupan bersama. Sehingga semua komponen atau term tersebut (demokrasi, kesejahteraan, unity dan sustainabilitas) memiliki "causal relationship" yang harus diapresiasi dalam pola berfikir sirkularitas. Jadi demokrasi itu adalah mekanisme yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kolektif guna mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang kita kehendaki ini harus bermakna. Kebermaknaan dari kesejahteraan itu hanya dapat tercipta bila ia dapat memelihara keutuhan bersama yang sekaligus dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama menuju keridho'an Allah SWT. Pandangan ini sesungguhnya merefleksikan cita-cita individu dan kolektif untuk

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat , konsep ICMI selalu kan kembali pada landasan Tuhan (*Wawancara, Drs.Nurdin Halik*)

Guna mendapatkan keridho'an Allah SWT, disyaratkan agar semua program pembangunan didasarkan pada nilai-nilai Illahiah, seperti kebaikan, kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, sebagai konsekuensi pola berfikir sirkularitas, maka nilai-nilai Illahiah inilah yang menjadi basis dalam pengembangan kualitas demokrasi yang ditujukan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat Indonesia secara penuh dalam berekonomi.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut maka seluruh program yang hendak dibangun harus koheren dengan cita-cita kolektif ICMI untuk me-*"nurture"* kehidupan kolektif umat Islam menuju keridho'an Allah SWT. Dalam konteks inilah, masyarakat yang dicitakan ICMI itu disebut sebagai masyarakat yang rahmatan lil alamin.

- Makna demokrasi bagi ICMI untuk morientasi ke depan

Dalam pembahasan ini akan di paparkan beberapa hal yang menjadi orientasi ICMI. Yakni :

1.Spirit Illahiah (kebaikan, kebenaran dan keadilan) yang dicitakan oleh ICMI sesungguhnya telah berbadankan dalam sistem konstitusi bangsa. Hal ini tercermin dalam sila keempat, pancasila yang dijabarkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pengkontruksian demokrasi Illahiah di bidang ekonomi ini terlihat dari beberapa ketentuan yang tertera dalam pasal 27(1) yang mewajibkan negara membuka aksesabilitas rakyat

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 33 yang menegaskan agar semua cabang-cabang produksi dan seluruh isi sumber daya kolektif di Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Ketentuan ini jelas merefleksikan kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat (sistem ekonomi kerakyatan).

2. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan pasal 27 dan 33 tersebut, pemerintah terikat oleh kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melahirkan produk kebijakan publik yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan berdasarkan cita-cita yang digariskan dalam pembukaan Uud 1945. secara normatif, pasal-pasal yang tertera dalam UUD 1945 itu menjadi meta-nilai bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian, maka negara berkewajiban untuk menumbuhkan partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia dalam membangun ekonomi nasional. Hal ini mewajibkan pemerintah untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam berekonomi. Oleh karena itu, ICMI mengusulkan :

a. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak melibatkan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui pengoptimalisasian potensi-potensi nasional yang belum

tergarap dengan baik, seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kultural.

b. Memperluas kesempatan dan jaminan perlindungan berusaha bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perlindungan ini dapat dilakukan dengan membatasi pendirian bentuk-bentuk usaha yang mengklusterkan sumber-sumber penghasilan UMKM. Misalnya, dalam hal pendirian Mall. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan publik untuk membatasi ijin dan pembangunan Mall sampai di tingkat propinsi saja. Selain itu, pemerintah juga dapat membatasi dan melindungi masyarakat dari pengakuisisian pengusaha-pengusaha besar atau konglomerasi.

- Makna kesejahteraan bagi ICM

Setelah era reformasi, negara kita ini sepertinya terjadi yang dikatakan demokrasi kebablasan. Sebagian orang yang menggagas demokrasi pasti tidak menyangka bahwa kejadiannya akan seperti ini. Contohnya : pilkada. Mungkin pada pelaksanaannya ilmu demokrasi digunakan. Tapi justru kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Malah banyak yang menjadi korban, banyak kerugian dan biaya yang digunakan sangat besar. Maka dari itu hasil dari SILAKNAS (silaturahmi kerja nasional) temanya "demokrasi untuk kesejahteraan". Jadi ICM sangat menjunjung tinggi demokrasi, tapi bukan demokrasi yang sekedar demokrasi untuk bagaimana berpendapat, bagaimana mendapat hak-hak dan menentukan pilihan, tetapi demokrasi untuk kesejahteraan. (Wawancara Dr.Ir.H.Andi Tamsil,MS)

ICMI berpandangan bahwa kesejahteraan yang bermakna itu tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pendapatan (*income*) dan aksesabilitas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan semangat keagamaan yang bermoral. Selain itu, aspek penting lainnya yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan yang bermakna itu, adalah penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi untuk kesejahteraan ini, harus diarahkan guna meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kegairahan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, ICMI mengusulkan :

1. Di Bidang Pendidikan

Memperluas akses informasi dan teknologi yang menstimulasi aktifitas pembelajaran yang lebih kreatif dan produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan dan pembebasan akses informasi dan teknologi bagi seluruh rakyat dengan memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan sosial dan keagamaan, seperti masjid-masjid, pondok-pondok pesantren dan remaja masjid dengan instrumen informasi dan teknologi yang memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pembelajaran jarak jauh.

2. Di Bidang Kesehatan

ICMI harus memfasilitasi pelayanan kesehatan yang murah dan baik hingga ke tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan oleh ICMI untuk memfasilitasi



pusat-pusat kesehatan masyarakat di lembaga-lembaga keagamaan, seperti pondok-pondok pesantren, masjid-masjid dan lain sebagainya. Selain itu ICMI juga harus meningkatkan aksesibilitas publik atas obat-obat esensial yang baik dan murah. Salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk memperluas aksesibilitas atas obat-obatan ini, ICMI dapat mendorong pemerintah agar mengkonstitusionalisasikan hak-hak paten atas produk-produk esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempertahankan survivalitasnya. (*Hayyan UL Haq, Contracting of Technology, International Journal, of Technology Tranferand Commercialization, IJTTC, Vol.6, No. 1, 2007, pp24-39*).

3. Di bidang hukum

Karena ICMI bersandikan nilai Illahiah, maka ICMI juga berkewajiban untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, selain ICMI harus tampil sebagai perintis dan peggiat dalam memberantas KKN, ia juga harus konsisten untuk melakukan refleksi, introspeksi dan koreksi diri guna membersihkan diri dari segala bentuk penyimpangan yang dapat mengancam dan menghancurkan eksistensi, kredibilitas, integritas ICMI sebagai lembaga yang rahmatan lil 'alamin. Hal ini menuntut keberanian dan kejujuran ICMI dalam melakukan self evaluation menuju organisasi yang kredibel, amanah dan rahmatan lil alamin.

4. Di Bidang Keagamaan

a. Saat ini, di Indonesia disinyalir terdapat lebih dari 250 aliran sesat. Hal ini berpotensi melahirkan keterbelahan dalam aqidah umat yang dapat mengancam keutuhan Islam yang pada gilirannya sangat berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks ini ICMI harus meningkatkan peran yang lebih serius untuk mengembangkan kualitas dakwah guna mendidik masyarakat agar mendapatkan pendidikan aqidah Islam yang benar sekaligus mengajak mereka yang telah kembali pada ajaran aqidah Islam yang benar, dan mencegah timbulnya aliran sesat baru yang akan menambah kompleksitas permasalahan umat.

b. Dalam penentuan awal ramadhan dan hari raya, mengingat ICMI sebagai perekat umat, maka ia berkewajiban memfasilitasi semua ormas Islam agar berdialog dalam menemukan kesepakatan untuk menentukan hari raya yang sama. Hal ini penting agar ICMI dapat menghilangkan benih-benih keterbelahan umat. Selain itu, keberhasilan ICMI dalam memfasilitasi dialog yang bermakna ini akan menjadi contoh dan barometer umat Islam seluruh dunia dalam mengasuh kebutuhan umat.

5. Di Bidang Penguatan Kelembagaan
ICMI harus meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih intensif dan bermakna antara ICMI pusat, Orwil dan Orsat dalam menata dan membangun kualitas kelembagaan yang lebih solid.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan di atas mengenai nilai persamaan Islam dan demokrasi serta implementasinya dalam perspektif ICMI, dan sesuai dengan rumusan masalah ada beberapa hal dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dalam pandangan ICMI, nilai persamaan Islam dan demokrasi terdiri dari dua indikator yaitu persamaan dalam perlakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan. Dengan merujuk pada teori weber yang berintikan pada nilai (1) sistem agama rasionallah yang memainkan peran kunci dalam menumbuhkan kapitalisme Barat, (2) agama mendukung terciptanya masyarakat yang berfikir rasional.

Nilai persamaan yang dimaksudkan dalam Islam dan demokrasi adalah tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara tanpa memandang suku, agama dan ras (SARA) serta kelas-kelas tertentu, dalam berkehidupan sosial. Dan adanya jaminan hukum akan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan fikiran.

2. Peran Ketua, sekretaris dan Dewan Pakar dalam mengimplementasikan nilai Islam dan demokrasi (persamaan perlakuan dan persamaan memperoleh kesempatan) sesuai dengan teori Weber yang memfokuskan pada institusi karena agama, sudah menunjukkan kemajuan dalam berorganisasi walaupun tidak mendekati kesempurnaan, mengingat adanya perbedaan latar belakang ideologi yang mereka miliki. Walaupun dalam ICMI mereka harus melepaskan baju ideologi yang berbeda itu, akan tetapi ego sentral tidak bisa dihapus dari individunya. Implementasi dari Islam dan demokrasi adalah kesejahteraan untuk masyarakat secara umum tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras (SARA) yaitu: implikasi demokrasi yang Ilahiah bagi peningkatan kesejahteraan dan implikasi kesejahteraan yang bermakna.

B. Saran-saran

Berdasarkan tinjauan penelitian dengan inisiatif untuk memajukan IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI), dalam pengimplementasian orientasi kerja, maka penelitian ini mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan program kerja hendaknya ICMI memiliki prioritas, posisi ICMI dalam hal ini adalah dibidang pemikiran dan konsep, artinya ICMI harus mampu memberikan solusi terhadap

berbagai permasalahan umat, bangsa dan negara terkhusus mengenai nilai-nilai persamaan.

2. ICMI harus mampu mengimplementasikan ide serta gagasan yang dikemukakannya. ICMI juga harus mampu memainkan peran dalam berbagai kepentingan publik. Mampu memberikan keyakinan dan harapan kepada umat untuk tetap berjuang mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang sama-sama diharapkan oleh bangsa Indonesia, yakni masyarakat "madani" yang dicita-citakan, baik ditingkat Organisasi Pusat (Orpus), Organisasi Wilayah (Orwil), Organisasi Daerah (Orda) maupun Organisasi Satuan (Orsat).

ICMI juga harus mampu jadi "*perekat*" dari berbagai kepentingan dan komponen umat dengan latar belakang disiplin dan profesi, mazhab. Ini akan menjawab apa dan bagaimana fungsi dan peran ICMI di masyarakat.

LAMPIRAN

Susunan Pengurus ICMI Indonesia

SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) PERIODE 2005-2010

Ketua : Bachruddin Jusuf Habibie, Prof. Dr. -ing. H.
Sekretaris : Haryanto Dhanutirto, Prof. Dr.

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT PUSAT IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) PERIODE 2005-2010

Ketua : Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. H. SH. MA
Sekretaris : Muhammad Said Didu, Dr. Ir.

SUSUNAN DEWAN PAKAR PUSAT IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) PERIODE 2005-2010

Ketua : Ginanjar Kartasasmita, Prof. Dr. ir. H.
Sekretaris : Hidayat Syarief, Prof. Dr. Ir. H.

EKONOMI

1. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Rokhmin Dahuri, Prof. Dr. Ir. MS.
Wakil Ketua : Agus Pakpahan, Dr. Ir.

2. ENERGI DAN PERTAMBANGAN

Ketua : Al Hilal Hamdi
Wakil Ketua : Luluk Sumiarto, Dr. Ir.

3. INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Ketua : A. Muqowwam, Drs. H.
Wakil Ketua : Musyanif, Ir.

4. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Ketua : DidikJ. Rachbini, Prof. Di. Ir.
Wakil Ketua : Dipo Alam, Dr. M.E.M

5. KEUANGAN FISKAL, INVESTASI DAN MONETER

Ketua : Umar Juoro, MA.
Wakil Ketua : Aries Muftie, SH. SE

6. KEWIRAUSAHAAN, KOPERASI, PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ketua : Didin S.Damanhuri, Prof. Dr. SE. MS. DE.
Wakil Ketua : Gunawan Sumodiningrat, Prof. Dr.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

7. PENDIDIKAN

Ketua : Fasli Djalal, Dr.
Wakil Ketua : Arief Rahman, Dr. MPd.

8. AGAMA, BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA

Ketua : Didin Hafidhuddin , Dr. K.H. M.Sc.
Wakil Ketua : Ary Ginanjar Agustian

9. BURUH DAN KETENAGAKERJAAN

Ketua : Moh. Jumhur Hidayat, Ir.
Waskil ketua : Tirta Hidayat, Dr.

10. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua : Kartono Muhammad, Dr.
Wakil Ketua : Nantho Susanto, Dr.

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN LANSIA

Ketua : Juniwati T. Masjchun sofwan, Dra. Hj.
Wakil Ketua : Mimi Husniati, Dra. MA

HUKUM, POLITIK DAN IPTEK

12. GOOD GOVERNANCE DAN OTONOMI DAERAH

Ketua : Sofian Effendi, Prof. Dr.
Wakil Ketua : Azlaini Agus, SH., MH.

13. POLITIK, DEMOKRASI DAN POLITIK INTERNASIONAL

Ketua : Indria Samego, Dr.
Wakil Ketua : Laode Ida, Dr.

14. HUKUM, HAM DAN HANKAM

Ketua : Andi Matalata, SH. MA
Wakil Ketua : Patrialis Akbar, SH.

15. KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Ketua : Dewi Fortuna Anwar, Prof. (research) Dr. APU
Wakil Ketua : M. Nasir Tamara, Dr.

16. IPTEK DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ketua : Setyanto P. Santosa
Wakil ketua : Aswin Sasongko, Dr. Ir.

SUSUNAN PENGURUS ICMI WILAYAH SULSEL

Ketua Dewan Penasehat : H. M. Amin Syam
Sekretaris Dewan Penasehat : Prof. Dr. H. Rahman Getteng, MA.
Ketua Dewan Pakar : Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
Sekretaris Dewan Pakar : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA

Ketua ICMI Orwil Sulsel : Prof. Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MS.
Sekretaris : Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS.
Bendahara : Ir. Hj. Apiaty Amin Syam, MS.

Ketua Divisi Pengemb. Kelembagaan : Dr. A. Pangerang Moenta, SH. MH
: Arman Arfah, SE

Ketua Divisi Pengemb. Ekonomi Kecil : Dr. Aris Munandar,
Ketua Divisi Pengemb. SDM & Pembudayaan : Dr. H. Arifuddin
MPd

Ketua Divisi Pengemb. Wawasan & Potensi Umat : Dr. H. Arifuddin
Ahmad : Dr. H. Hambali Thalib, SH.

Ketua Divisi Pengemb. Hukum & HAM : Drs. H. Waspada Santing
MH : Drs. Akhyar Anwar, M, Si

Ketua Divisi Pengemb. Media & Hub. Luar : Dra. Nurlinda Azis, M, Si

Ketua Divisi Pengemb. Kebudayaan
Ketua Divisi Pengemb. Peranan Wanita

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2003, *Komunikasi Politik*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Agger, Ben. 1998, *Critical Social Theories : An Introduction*. Boulder, Cob. : Westview
- Arsyad, Armin. Yak'ub, Andi. Amunanto, Ali. 2006, *Satuan Acara Pengajaran Dan Bacaan Mata Kuliah. Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Azra, Azyumardi. 2003, *Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Budiarjo, Meriam. 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Brannen, Julia. 2002, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Esposito, John L, dan John O. Voll. 1996. *Islam dan demokrasi*. New York: Universitas Oxford Press
- Faisal, Sanafiah. 1999, *Format- Format Penelitian Sosial*, PT Rja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson (terj). 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta
- Koiruddin. 2005, *Politik Kiai*, Averroes Press, Malang.
- Mahasin, Aswab. 2000. *(Membangun Civil Society Dari Kancah Yang Rentan : Sebuah Pengantar) "Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000. Refleksi Pengalaman Dua Dasawarsa LSM*. Editor: Rustam Ibrahim. CESDA-LP3ES, Jakarta
- Masika Editor. 1996. *Kebebasan Cendekiawan : Refleksi Kaum Muda*. Pustaka Republika, Yogyakarta.
- Mas'ood, Mohtar. 1994, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad, Abu Syaikh. 1997, *Agama Demokrasi. Pilih Islam Atau Demokrasi*, Kafayeh Cipta Media, Jawa Tengah.

Mujani, Saiful. 2007, *Muslim Demokrat (Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Qodir, Zuli dan Songell, Lalu M.Iqbal, 1995. *ICMI : Negara dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahman, Arifin. 2002, *Sistem Politik Indonesia*, SIC, Surabaya.

Rauf, Maswadi. 1997, *Teori Demokrasi Dan Demokratisasi*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap pada FISIP UI.

Ritzer and Barry Smart (EDS), *Hand Book Of Social Theory*. London: Sage: 60-272.

Ritzer, Goergedan J. Goodman Douglas, 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media, Jakarta.

Roy, Olivier. 1994. *Kegagalan Politik Islam*. Harvard University Press. Cambridge

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1986, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Suyatno. 2004, *Menjelajahi Demokrasi*, Liebe Book Press, Yogyakarta.

Voll, John Obert. 1997, *Politik Islam : Kelangsungan Dan Perubahan Di dunia Modern*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta.

Zaidan, Abdul Karim, Az-Zindani Abdul Majid, Harbah Muhammad Yusuf. 2003, *Pemilu dan Parpol Dalam Perspektif Syariah*, Syamil Cipta Media, Bandung.

Zainuddin, A. Rahman, Basyar M. Hamdan. 2000, *Syah dan Politik Di Indonesia*, Mizan, Bandung.

Dokumen dan Artikel :

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Rancangan Ketetapan Muktamar ICMI IV, Rancangan Garis Besar Program ICMI Periode 2005-2010*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Laporan Badan-Badan Otonomi ICMI dan Artikel-Artikel Kepemimpinan ICMI*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Buku Panduan Muktamar IV ICMI*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pengurus Pusat ICMI*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Rancangan Ketetapan Muktamar ICMI IV, Rancangan Khittah, Kode Etik, & Wawasan Pengabdian ICMI 2005-2010*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *Rancangan Ketetapan Muktamar ICMI IV, Organisasi Kelembagaan*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2008, *Silaknas ICMI, Laporan Pelaksanaan Program Kerja*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.

IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI). 2005, *"Long Mars" Tahap Kedua ICMI. Membangun Masyarakat Madani Yang Bermoral dan Berdaya Saig Tinggi*, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta.